

LEMBARAN DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 30

Tahun 1994

Seri D

=====

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 3 TAHUN 1994 (3/1994)
TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Pelita Kelima Daerah telah memberikan hasil-hasil yang positif dan telah mampu mewujudkan keadaan yang cukup mantap sebagai landasan pembanguana tahap berikutnya, oleh karena itu untuk memberikan kejelasan arah dan pedoman pelaksanaan Pembangunan Daerah tahap berikutnya sebagai usaha untuk meningkatkan keserasian dan keselarasan Pembangunan Nasional maka perlu adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah.
 - b. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1994/1995-1998/1999 dan garis besarnya berisikan Pola Umum Pembangunan Jangka panjang Kedua Daerah dan Pola Umum Pembangunan lima Tahun Keenam Daerah, mempunyai arti khusus dan Stralegis, karena merupakan tahap awal Pembangunan Jangka Panjang 25 Tabun Kedua dan sekaligus merintis serta mempersiapkan tahap Pembangunan Jangka panjang 25 Tahun Ketiga yang merupakan langkah untuk menuju kemandirian dalam melaksanakan pembangunan yang berlanjut.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1994/1995-1998/1999.
- Mengingat :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Yogyakarta dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1960 tentang Pengubahan Pasal 9 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Yogyakarta.
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya

Daerah Tingkat II Yogyakarta.

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kota Yogyakarta Tahun 1985-2005.
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

Pasal 1

Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh maka sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta di susun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : PEMBANGUNAN DAERAH
BAB III : PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH
BAB IV : PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH
BAB V : PELAKSANAAN
BAB VI : PENUTUP

Pasal 2

Isi dan uraian rincian Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tersebut pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini terdapat dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, yang merupakan Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) Keenam Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta dan selanjutnya setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikomadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Yogyakarta, 28 Pebruari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

WALIKOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II

ttd.

ttd.

WAHYU HARDJONO

R. WIDAGDO

Disahkan Oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Surat Keputusan

Tanggal : 14 Juli 1994
Nomor : 218/KPS/1994

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

Tanggal : 10 Agustus 1994
Nomor: 30

Sekretaris Wilayah/Daerah
Kotarnadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

Drs. H. Munawir
NIP.: 490009988

LAMPIRAN

PERATURAN DARRAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

NOMOR : 3 TAHUN 1994

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Pengertian
Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta adalah pokok-pokok kebijaksanaan Pembangunan Daerah yang bersifat menyeluruh, terarah dan terpadu serta berkesinambungan. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta merupakan penjabaran dari Pola Dasar Pembangunan. Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diselesaikan dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah.
- B. Maksud dan Tujuan
Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur Pemerintah Daerah. Aparatur Pemerintah Pusat di Daerah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta ditetapkan dengan tujuan untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Yogyakarta yang adil, makmur dan merata yang dilaksanakan secara bertahap, baik dalam jangka sedang 5 tahun, maupun dalam jangka panjang 25 tahun.
- C. Landasan
Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 serta Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1993 sebagai landasan operasional.
- D. Ruang Lingkup
Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta memberikan gambaran mengenai Wujud masa depan yang diinginkan dan diperjuangkan, serta upaya pencapaiannya dalam jangka panjang 25 tahun dan jangka sedang 5 tahun. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta berisi Pembangunan Daerah, Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah. Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I	: PENDAHULUAN
Bab II	: PEMBANGUNAN DAERAH
Bab III	: PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH
Bab IV	: PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH
Bab V	: PELAKSANAAN
Bab VI	: PENUTUP

BAB II

PEMBANGUNAN DAERAH

A. Kondisi Dan Potensi Daerah

1. Kondisi Daerah

- a. Letak wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta terbentang antara 110 derajat 24'19" sampai 110 derajat 28'53" Bujur Timur dan 07 derajat 49'26" sampai 07 derajat 15'24" Lintang Selatan.
- b. Titik ketinggian Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta adalah kurang lebih 114 meter di atas permukaan air laut. Dari barat ke timur kota relatif datar, dari utara ke selatan mempunyai kemiringan kurang lebih 1 derajat.
- c. Luas wilayah 32.5 km² atau kurang lebih 1.02 % dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terbelah oleh tiga sungai dengan kedalaman cukup dan mengalir ke arah selatan. sedangkan komposisi penggunaan lahan tahun 1992 terdiri :
- | | | |
|--------------------|--------|-------------|
| - Tanah Pekarangan | seluas | 2.587,09 Ha |
| - Tanah Sawah | seluas | 294,77 Ha |
| - Tanah Tegalan | seluas | 2,35 Ha |
| - Kolam Ikan | seluas | 13,68 Ha |
| - Tanah lain-lain | seluas | 352,11 Ha |
| ----- + | | |
| Jumlah | = | 3.250,00 Ha |
- d. Jumlah penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 sebesar 452.866 dengan kepadatan rata-rata sebesar 13.934 jiwa/m². Komposisi penduduk menurut umur terdiri dari :
- | | | |
|-------------------------|-----------|---------------|
| - Umur 1-14 Tahun | berjumlah | 98.679 orang |
| - Umur 15-24 Tahun | berjumlah | 137.852 orang |
| - Umur 24 Tahun ke atas | berjumlah | 216.335 orang |
- e. Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, penduduk siang (Day population) relatif lebih besar dibanding dengan penduduk terdaftar.
- f. Pertumbuhan ekonomi di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta selama Repelita V menunjukkan angka rata-rata 6,49 % /tahun.
- g. Kurang lebih 6,08% dari penduduk Tahun 1992 masih berpendapatan di bawah garis kemiskinan (dengan menggunakan ukuran kebutuhan fisik minimum 360 kg nilai tukar beras per kapita per tahun sebagai garis kemiskinan) menyebar di seluruh wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- h. Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta khususnya mahasiswa dan cendekiawan dengan kondisi

dan potensi yang majemuk serta tangguh menjadikan kota Yogyakarta tetap merupakan barometer nasional dalam kehidupan politik.

- i. Kemampuan administrasi dan keuangan Pemerintah Daerah kurang sebanding dengan beban tanggung jawab.
- j. Perkembangan Tata Ruang khususnya daerah hunian dan kawasan strategis kurang teratur dan kurang memenuhi persyaratan lingkungan hidup.
- k. Prasarana yang ada belum cukup seimbang antara pusat kota dengan sekitarnya mengakibatkan nilai strategis lahan, kurang merata.

2. Kondisi bidang pembangunan meliputi :

- a. Bidang Ekonomi.
Sektor perdagangan dan pengangkutan & komunikasi saat ini merupakan sektor dominan dalam pertumbuhan PDRB dan sekaligus paling banyak menyerap tenaga kerja. Sesuai dengan kondisi potensi, serta peran dan fungsi Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagai pusat pengembangan regional telah terjadi pergeseran lapangan usaha dari sektor primer ke sektor sekunder maupun tersier (penyedia jasa). Dalam perkembangannya selain sektor perdagangan dan pengangkutan & komunikasi, sektor jasa dan sektor industri merupakan sektor yang prospektif untuk dikembangkan.
- b. Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan.
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta merupakan salah satu pusat pendidikan dan pusat kebudayaan yang merupakan aset budaya Nasional, mempunyai karakteristik umum masyarakat di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang bersifat religius, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki jiwa patriotik yang menjadi tenaga penggerak pembangunan yang tak ternilai harganya bagi pembangunan manusia seutuhnya.
- c. Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang bersifat religius, rukun, harmonis dalam hubungan umat beragama, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, merupakan modal rohani dan mental spiritual yang menimbulkan, sifat tabah, sederhana dan tenggang rasa.
- d. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Lembaga-lembaga ilmiah dan lembaga-lembaga penelitian yang jumlahnya cukup banyak dengan tenaga ahli profesional yang mampu mengembangkan dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dapat mendukung pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

- e. Bidang Hukum
Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta bersifat heterogen dan sebagian generasi muda datang dari berbagai daerah. Meskipun dukungan aparatur, sarana dan prasarana hukum makin memadai, namun kesadaran hukum masyarakat masih kurang mantap.
- f. Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa.
Pembangunan politik telah menciptakan stabilitas politik yang cukup mantap dan lebih dinamis. Hal ini tercermin antara lain pada pelaksanaan demokrasi Pancasila yaitu Pemilihan Umum 1992 telah berlangsung dengan tertib dan aman yang diikuti sebagian besar masyarakat. Pembangunan aparatur pemerintah telah dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah sehingga pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat pembangunan semakin baik. Pembangunan penerangan, komunikasi dan media massa telah mampu berperan dalam melancarkan arus informasi pada aspek-aspek kegiatan pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas media cetak maupun elektronik.
- g. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
Ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagai bagian integral dari pertahanan keamanan Nasional di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sampai akhir Pelita V cukup mantap atas kerjasama antara Pemerintah Daerah, aparatur keamanan dan masyarakat.

3. Potensi Daerah

- a. Kaidah-kaidah hidup sosio kultural masyarakat Yogyakarta antara lain:
 - Sangkan paraning dumadi berarti hubungan manusia dengan penciptanya
 - Manunggaling Kawula lan Gusti berarti kesatuan dan persatuan rakyat dengan pemerintah
 - Mangayu Hayuning Bawana berarti memelihara dan memperindah dunia
 - Paju papat lima pancer berarti memelihara keamanan dan ketertiban
 - Ana rembug pada dirembug berarti setiap masalah diselesaikan dengan musyawarah
 - Tapa selira dan mawas diri

menjiwai semangat masyarakat Yogyakarta yang rasional dan religius.

Nilai-nilai tradisi dan seni budaya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila cukup beralasan untuk dikembangkan.

- b. Kedudukan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagai pusat pengembangan wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpengaruh timbal balik terhadap daerah sekitarnya, antara lain tampak pada lapangan usaha jasa, pariwisata, perdagangan, industri dan pelayanan kesehatan.
- c. Pendidikan dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, serta semangat juang dan cinta kemerdekaan yang dimiliki masyarakat Yogyakarta, di samping memberi pengaruh positif bagi pembinaan warga kota, ternyata menempatkan daerah ini sebagai laboratorium yang telah menghasilkan kader-kader yang herkepribadian kuat, pimpinan bangsa, cendekiawan, teknokrat dan tenaga terdidik yang bersemangat pengabdian tinggi.

B. Makna dan Hakekat Pembangunan Daerah

Makna Pembangunan Daerah adalah pembanguan dari dan untuk masyarakat, yang dilaksanakan oleh masyarakat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat di daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Keseluruhan semangat arah dan gerak pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dilaksanakan sebagai pengamalan semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai Kesatuan yang utuh, meliputi:

1. Pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang antara lain mencakup tanggung jawab bersama dari semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus menerus dan bersama-sama meletakkan landasan spiritual, moral, dan etik yang kukuh bagi pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.
2. Pengamalan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang antara lain mencakup peningkatan martabat serta hak dan kewajiban warga masyarakat.
3. Pengamalan sila Persatuan Indonesia, yang antara lain mencakup usaha-usaha dalam ikut meningkatkan semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam rangka memperkuat

persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Pengamalan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan yang antara lain mencakup upaya makin menumbuhkan dan mengembangkan sistem politik Demokrasi Pancasila yang makin mampu memelihara stabilitas daerah yang dinamis. mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab politik warga masyarakat, serta menggairahkan rakyat dalam proses politik.
5. Pengamalan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas maka Hakekat Pembangunan Daerah adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan, masyarakat seluruhnya yang merata secara material dan spiritual

C. Tujuan Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mendukung Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta bertujuan mengembangkan potensi daerah secara optimal.

D. Asas Pembangunan Daerah

Asas pembangunan daerah adalah prinsip pokok yang harus dipegang teguh dan diterapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Asas-asas tersebut adalah :

1. Asas Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan daerah dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik dalam rangka pembangunan daerah sebagai pengamalan Pancasila.
2. Asas Manfaat : bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan daerah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan pribadi warga masyarakat serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai

luhur budaya bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

3. Asas Demokrasi Pancasila : bahwa upaya mencapai tujuan pembangunan daerah yang meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, gotong royong, persatuan dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Asas Adil dan Merata : bahwa pembangunan daerah yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah di mana setiap warga masyarakat berhak memperoleh kesempatan, berperan dan menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya.
5. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan dalam Peri Kehidupan : bahwa dalam pembangunan daerah harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan yaitu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan dunia dan akherat, materiil dan spiritual, jiwa dan raga, individu dan masyarakat serta lingkungannya.
6. Asas Hukum : bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan daerah setiap Warga masyarakat dan penyelenggara pemerintahan harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.
7. Asas Kemandirian : bahwa pembangunan daerah berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepada kepribadian bangsa.
8. Asas Kejuangan: bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, penyelenggara pemerintahan di daerah dan masyarakat harus memiliki mental, tekad, jiwa, dan semangat pengabdian serta ketaatan dan disiplin yang tinggi dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan atau golongan.
9. Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi : bahwa agar pembangunan daerah dapat memberikan kesejahteraan rakyat lahir batin yang setinggi-tingginya, penyelenggaraannya perlu menerapkan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendorong pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara seksama dan bertanggung jawab dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya daerah.
10. Asas Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Medebewind: bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah menganut

ketiga asas tersebut untuk mengembangkan dan mendayagunakan peran serta, aspirasi dan potensi daerah.

E. Matra Ruang Pembangunan Daerah.

1. Ruang yang meliputi ruang daratan dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah merupakan wadah yang menampung manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Ruang meliputi potensi sumberdaya alam dan buatan serta masalah-masalah yang timbul akibat adanya proses alam dan atau ulah manusia. Tata ruang wilayah merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang terdiri atas kawasan-kawasan dengan spesifikasi fungsi utama sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya.

2. Sejalan dengan prinsip-prinsip keruangan, suatu ruang akan mempunyai batas-batas yang membentuk ukuran maksimum baik daya tampung atau daya dukung maupun kemampuan untuk dikembangkannya. Untuk itu maka pemanfaatan dan pengembangan ruang harus diupayakan secara bijaksana dengan memperhatikan keserasian, keseimbangan, kelestarian lingkungan hidup melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
3. Ruang wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta merupakan pusat dari perkotaan Yogyakarta. Untuk itu keserasian sistem keruangan antara Kota Yogyakarta dengan daerah pertumbuhannya yang berada di daerah tingkat II sekitarnya harus diupayakan dengan baik.
4. Pengembangan tata ruang wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta terdiri atas pengaturan tata ruang, tata bangunan dan ruang terbuka.

Secara yuridis formal untuk :

- Tata ruang, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang RUTRK, RDTRK dan RTRK.
- Tata Bangunan, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Bangunan.
- Ruang Terbuka Hijau, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pola Ruang Terbuka Hijau Kota.

Kesemuanya sebagai matra ruang kegiatan pembangunan di daerah yang mempunyai fungsi sebagai alat pembimbing/pemberi arah, pengatur maupun pengendali semua kegiatan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

5. Dalam mewujudkan suatu rencana serta mengantisipasi perkembangan dan tuntutan jaman terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, kegiatan koordinasi dan pengkajian terhadap kecenderungan-kecenderungan pemanfaatan ruang serta kemampuan daya dukung lingkungan yang ada, perlu ditingkatkan intensitasnya agar konflik pemanfaatan ruang dan dampak-dampak negatif dapat dihindarkan /diselesaikan.

BAB III

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA DAERAH

A. Umum

Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta mengacu pada Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi waktu 25 tahun. Pembangunan Jangka Panjang Pertama Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta telah menghasilkan kemajuan dalam segenap aspek kehidupan masyarakat dan telah meletakkan landasan yang cukup kuat bagi daerah untuk memasuki Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah walaupun masih ditemui beberapa kendala.

1. Pembangunan Ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta telah banyak mencapai kemajuan dan berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat antara lain terpenuhinya sebagian besar kebutuhan pokok rakyat. Pertumbuhan berbagai sektor ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta terutama sektor perdagangan, pengangkutan dan komunikasi telah mampu memperkuat perekonomian daerah, kecenderungan yang ada terlihat bahwa pergeseran struktur perekonomian dari sektor primer ke sektor sekunder dan bahkan ke sektor tersier meningkat.
2. Pembangunan kesejahteraan rakyat telah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, usia harapan hidup, keadaan gizi dan terkendalinya pertumbuhan penduduk. Jangkauan pelayanan kesehatan semakin merata, walaupun belum seluruh anggota masyarakat dapat terlayani secara maksimal. Pembangunan pendidikan selama Pembangunan jangka Panjang Pertama Daerah telah dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan terutama pada usia sekolah SD dan SLTP. Perkembangan lembaga-lembaga pendidikan baik secara formal maupun non formal telah dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat sehingga semakin memantapkan predikat Yogyakarta sebagai salah satu kota pendidikan yang terkemuka.

Pembangunan kebudayaan telah diupayakan untuk melestarikan dan mengembangkan aset budaya daerah yang sekaligus menjadi aset kebudayaan nasional, antara lain adanya pembangunan museum, pengembangan kebudayaan tradisional dan pemugaran tempat-tempat bersejarah dalam rangka mendukung eksistensi bangsa.

3. Kerukunan hidup antar dan antara umat beragama dan penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, peran serta umat beragama dalam pembangunan dan kualitas kehidupan beragama makin meningkat. Tata nilai dan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara makin mantap dan pengaruh nilai baru yang positif menumbuhkan dan memperkuat sikap dan perilaku masyarakat yang makin maju, mandiri dan berkepribadian luhur.
4. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi melibatkan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dalam pengembangan kemampuan Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk memacu proses pembaharuan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki.
5. Pembangunan hukum dan peraturan perundangan telah dapat menciptakan sistem hukum dan produk hukum yang mengayomi dan memberikan landasan hukum bagi kegiatan masyarakat dan pembangunan. Kesadaran hukum yang meningkat dan makin lajunya pembangunan menuntut terbentuknya sistem hukum dan produk hukum yang mendukung dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan dalam bidang ini selanjutnya masih perlu memperhatikan peningkatan pemasyarakatan hukum, peningkatan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen, peningkatan aparatur hukum yang berkualitas bertanggungjawab, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
6. Pembangunan politik telah berhasil meningkatkan tatanan kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Demokrasi Pancasila yang mendorong semakin berperannya lembaga politik Organisasi Sosial Politik makin dituntut lebih berkualitas dan mandiri sehingga lebih berperan dalam menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Aparatur pemerintah makin dituntut untuk lebih terbuka dan peka dalam menanggapi dinamika masyarakat. Peranan penerangan, komunikasi, dan media massa makin menumbuhkan peran serta masyarakat. Keterbukaan yang bertanggungjawab telah makin meningkat dan berkembang, sementara, arus komunikasi timbal balik dan penyaluran aspirasi politik masih memerlukan perhatian.
7. Pembangunan Ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagai bagian integral dari bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat telah berhasil mewujudkan

terpeliharanya stabilitas daerah yang dinamis, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara lancar dan aman. Kebutuhan personil, sarana dan prasarana pendukung baik jumlah maupun kualitasnya terus diperhatikan sesuai dengan tuntutan pembangunan.

Masalah-masalah pokok yang belum terselesaikan pada Pembangunan jangka Panjang Pertama Daerah dan masih perlu diselesaikan antara lain:

1. Masih terdapat penduduk yang hidup, di bawah garis kemiskinan.
2. Laju pertumbuhan angkatan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan lapangan kerja dan kesempatan kerja
3. Belum mantapnya sistem lalu-lintas antara lain akibat pergeseran struktur ekonomi dari primer ke tersier.
4. Aspek sosial, budaya dan ekonomi sebagai akibat urbanisasi dan bertemunya berbagai bangsa/suku di wilayah kota. Selain itu adanya nilai-nilai baru yang datang dari luar belum tentu sesuai dengan budaya daerah.
5. Keterbatasan personal aparatur, sarana dan prasarana pendukung, baik kuantitas maupun kualitasnya, dan masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban, serta masih kurangnya tingkat kemandirian sebagian organisasi sosial politik dan tingkat kemampuan dalam menampung serta memperjuangkan aspirasi masyarakat.

B. Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah

Pembangunan Jangka Panjang Daerah bertujuan membangun masyarakat maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin dengan peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta untuk memantapkan predikat dan fungsi kota :

1. Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan yang menuju kepada masyarakat yang mampu memilih dan menyerap budaya modern dengan tetap melestarikan nilai-nilai budaya daerah.
2. Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagai kota perjuangan yang menuju kepada masyarakat yang mampu melestarikan dan menanamkan jiwa kebangsaan dan nilai-nilai kejuangan bagi segenap warga masyarakat terutama generasi muda.

3. Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang menuju kepada masyarakat IPTEK terkemuka.
4. Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagai tujuan wisata yang menuju kepada masyarakat pergaulan antar bangsa yang dilandasi dan diperkaya oleh budaya daerah.
5. Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan, pertumbuhan dan pengembangan wilayah, pelayanan transportasi dan perdagangan Propinsi DIY menuju kepada hubungan timbal balik yang serasi, selaras dan seimbang meliputi seluruh aspek kehidupan, dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

C. Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah

Sasaran Umum

Sasaran Umum Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah adalah terciptanya kualitas manusia dan masyarakat yang maju dan mandiri dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir batin dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila.

Dalam suasana kehidupan bangsa yang serba berkeimbangan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam dan lingkungannya, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah, senantiasa harus mewujudkan pemantapan otonomi Daerah dan memperkuat ketahanan Regional maupun Nasional.

Upaya pencapaian sasaran dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah diselenggarakan melalui tujuh bidang pembangunan yaitu bidang ekonomi, bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan, bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang hukum, bidang politik, aparatur negara, penerangan, komunikasi dan media massa serta bidang pertahanan keamanan.

1. Bidang Ekonomi
Terciptanya perekonomian daerah yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata, pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, memajukan sektor jasa, perdagangan dan transportasi, didorong oleh kemitrausahaan yang kokoh antara Badan Usaha Milik Negara, Koperasi dan Swasta serta pendayagunaan sumber daya alam secara optimal yang didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2. Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang makin sejahtera lahir batin secara adil dan merata, berkurangnya masyarakat miskin dan dapat memenuhi kebutuhan pokok; sandang, pangan, papan, pendidikan dan perbaikan derajat kesehatan serta mantapnya budaya daerah yang merupakan bagian dari kebudayaan dan kepribadian bangsa.

3. Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Terciptanya suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penuh kerukunan antara umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tercermin dalam suasana kehidupan yang harmonis, serta kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.
4. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .
Tercapainya kemampuan daerah dalam pemanfaatan pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memacu pembangunan. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi nilai-nilai luhur budaya dan nilai keimanan serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Bidang Hukum
Terbentuk dan berfungsinya sistem Hukum yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan daerah dan nasional, yang didukung oleh aparatur hukum yang berdisiplin tinggi, sarana dan prasarana yang memadai serta kesadaran masyarakat yang tinggi dan taat hukum.
6. Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa.

Tercipta dan berfungsinya tatanan kehidupan politik yang konstitusional berdasarkan demokrasi Pancasila yang mantap dan dinamis, dengan kualitas manusia dan masyarakat yang memiliki kesadaran dan etika politik yang tinggi serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan budaya politik Pancasila.

Terciptanya Aparatur Daerah yang berdisiplin tinggi, bersih, bertanggungjawab, penuh pengabdian, produktif dan profesional. dinamis, serasi dan bertanggung jawab.

Semakin mantapnya Aparatur Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab yang semakin mampu menunjang kepentingan nasional yang diperkuat oleh penyelenggaraan penerangan, komunikasi dan media massa yang mampu menggugah peran serta masyarakat dan

berfungsi positif terhadap upaya mengoptimalkan dan pemeratakan manfaat pembangunan di segala bidang.

7. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.
Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagai salah satu komponen pertahanan dan keamanan yang berkekuatan dan berkemampuan sebagai daya tangkal yang tangguh berdasarkan sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, kesadaran bela negara yang tinggi dan mendukung pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI serta kemanunggalan ABRI dan Rakyat yang mantap dan dinamis.

D. Titik Berat Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah

Titik berat Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dilaksanakan saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan bidang-bidang lainnya sehingga dapat terlaksana seirama, selaras dan seimbang untuk keberhasilan pembangunan daerah.

E. Arah Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah

1. Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, terciptanya pemerataan serta menumbuhkan pola hidup sederhana. Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi bertumpu pada segenap kemampuan modal, potensi serta kebijakan daerah dan diprioritaskan untuk golongan ekonomi lemah melalui pembangunan koperasi yang sehat untuk mewujudkan koperasi sebagai badan usaha tangguh, kuat dan mandiri.
2. Pembangunan jangka Panjang Kedua Daerah diarahkan untuk mencapai sasaran dalam rangka memantapkan predikat Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagai kota budaya, perjuangan, pendidikan, tujuan wisata serta fungsi kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan, pertumbuhan dan pengembangan wilayah, pelayanan transportasi dan perdagangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang didukung dengan pengembangan pusat-pusat Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat.
3. Pendayagunaan sumber daya alam sebagai kemakmuran rakyat dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan.
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi disamping meningkatkan produksi, perlu pula segera diciptakan dan diperluas kesempatan kerja yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan.

Untuk itu diperlukan peningkatan investasi pemerintah, dukungan swasta, bantuan luar negeri dan peran serta aktif masyarakat. Pembangunan industri serta sektor produktif lainnya ditingkatkan dan diarahkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pembangunan koperasi perlu dilanjutkan dan semakin diarahkan untuk mewujudkan koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat, dan mandiri serta sebagai soko guru perekonomian yang merupakan wadah untuk menggalang ekonomi rakyat di semua kegiatan perekonomian, sehingga mampu berperan terutama dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan itu perlu ditingkatkan dengan sungguh-sungguh penataan koperasi, usaha negara dan usaha swasta agar masing-masing melaksanakan fungsi dan peranannya dalam perekonomian daerah yang didasarkan pada demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila.

5. Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
6. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, kualitas sumber daya manusia dan memperluas serta meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan harus dipenuhi, antara lain melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Pendidikan yang berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan sedini mungkin merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu peran aktif masyarakat dalam semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, perlu didorong dan ditingkatkan.
7. Pembangunan kebudayaan diarahkan untuk meningkatkan nilai-nilai budaya dari luar yang positif dan sekaligus menolak nilai budaya yang merugikan pembangunan, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengangkat derajat kemanusiaan yang berbudi pekerti luhur, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memantapkan kepribadian bangsa.
8. Pembangunan kependudukan diarahkan pada peningkatan kualitas penduduk dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta perwujudan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Upaya penurunan tingkat pertumbuhan penduduk perlu dilanjutkan dan lebih ditingkatkan. Upaya

mengatasi masalah kependudukan antara lain melalui transmigrasi, perlu dilanjutkan dan lebih diarahkan kepada transmigrasi swakarsa. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta meningkatkan mutu dan kemudahan pelayanan kesehatan yang harus makin terjangkau oleh lapisan masyarakat serta meningkatkan gizi dan membudayakan sikap hidup bersih dan sehat, didukung dengan pembangunan perumahan dan permukiman yang layak.

9. Pembinaan anak, remaja, dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa diarahkan untuk mengembangkan sikap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, sikap keteladanan dan disiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus dilaksanakan sedini mungkin di lingkungan keluarga, di sekolah dan di lingkungan masyarakat.

Pembinaan peranan wanita sebagai mitra sejajar pria dalam pembangunan harus dikembangkan dengan memperhatikan kodrat serta harkat martabatnya.

10. Pembangunan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diarahkan untuk mampu meningkatkan kualitas umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga tercipta suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang penuh keimanan dan ketaqwaan dan kerukunan yang dinamis serta makin meningkatnya peran serta Umat dalam pembangunan.
11. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mempengaruhi keberhasilan membangun masyarakat maju dan mandiri. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan agar pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaannya dapat mempercepat peningkatan kecerdasan dan kemampuan bangsa, mempercepat proses pembaharuan, meningkatkan produktivitas dan efisien, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas, harkat dan martabat bangsa serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
12. Pembangunan hukum diarahkan untuk menghasilkan produk hukum yang mampu mengatur tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan, didukung oleh aparatur hukum yang bersih, berwibawa, penuh pengertian, sadar dan taat hukum, mempunyai rasa keadilan sesuai dengan kemanusiaan, serta profesional, efisiensi, dan efektif, dilengkapi sarana dan prasarana hukum yang memadai serta mengembangkan masyarakat yang sadar dan taat hukum.
13. Pembangunan politik diarahkan pada terwujudnya tatanan kehidupan politik berdasarkan Demokrasi Pancasila yang makin mampu menjamin berfungsinya lembaga politik dan lembaga kemasyarakatan, mantapnya proses komunikasi

politik baik antara supra dan infrastruktur politik maupun antar sesama supra dan infrastruktur politik dengan masyarakat, serta mengembangkan suasana dan sikap keterbukaan yang bertanggungjawab. Pembangunan politik harus makin meningkatkan kualitas pendidikan politik, keteladanan dan kaderisasi politik, memantapkan etika dan moral budaya politik yang berdasarkan Pancasila. Pembangunan penerangan komunikasi dan media massa lebih ditingkatkan dan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat serta menggerakkan dan menggairahkan peran serta aktif dalam pembangunan dan dalam seluruh dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

14. Pembangunan aparatur pemerintah di daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas aparatur agar lebih memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggungjawab, disiplin, keadilan, dan kewibawaan sehingga dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan hati nurani rakyat.

Sejalan dengan itu perlu diupayakan penataan kewenangan yang rasional di antara jajaran dan perangkat aparatur sehingga terlaksana penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang bersih, berwibawa, profesional, efisien dan efektif.

15. Pembangunan ketentraman dan ketertiban masyarakat diarahkan pada kemampuan untuk mewujudkan daya tangkal yang tangguh dalam sistem pertanahan keamanan rakyat semesta, didukung oleh manusia yang profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara yang tinggi, pelaksanaan Dwi fungsi ABRI dan kemanunggalan ABRI dan Rakyat yang semakin dinamis, serta didukung pula oleh sarana dan prasarana sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar terjamin ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mantap dan dinamis.

F. Arah Penataan Ruang Daerah

1. Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta merupakan sub sistem wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebagai bagian pengembangan hirarkhi ke I dikembangkan menjadi kawasan perkotaan dan dibudidayakan untuk non pertanian.
2. Dalam pembentukan jaringan dan peletakan fungsi kegiatan tetap berlandaskan konsep Pangeran Mangkubumi 1755.
3. Dalam membentuk perwujudan kota pengembangan dan penataan tetap diarahkan untuk memantapkan predikat dan fungsi kota menuju terwujudnya Yogyakarta Berhati Nyaman.

4. Penataan ruang kota diarahkan pada tatanan yang dapat mendorong meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.
5. Dalam pengembangan kawasan-kawasan diarahkan pada penggunaan lahan yang seoptimal mungkin sebagai upaya penyediaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi yang merata.
6. Dalam menanggulangi permasalahan kependudukan diarahkan untuk tetap mempertimbangkan wilayah pertumbuhan yang tidak hanya sebatas wilayah administratif.
7. Dalam menanggulangi permasalahan kota diperlukan penyiapan prasarana dan sarana secara terpadu.

BAB IV

PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM DAERAH

A. Umum

1. Pembangunan ekonomi telah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, menekan tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan masyarakat dan pengangguran. Selanjutnya pembangunan dalam bidang ekonomi perlu didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga akan dapat diharapkan peningkatan ekonomi rakyat, peningkatan produksi dan efisiensi, perluasan kesempatan berusaha dan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.
2. Pembangunan kesejahteraan rakyat telah ditingkatkan antara lain dengan semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, jumlah dan mutu pelayanan lembaga sosial masyarakat, baik dipanti sosial maupun di luar panti, dengan peran masyarakat yang semakin nyata. Harapan dan tuntutan masyarakat juga semakin meningkat. Kesadaran, tanggungjawab sosial dan rasa kesetiakawanan sosial masyarakat telah semakin meningkat untuk berperan serta menyelesaikan masalah sosial yang dialami oleh sebagian masyarakat yang kurang beruntung. Pembangunan pendidikan telah berhasil meletakkan dasar yang mantap bagi terwujudnya Sistem pendidikan nasional, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan secara lebih nyata serta telah berhasil semakin meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, jumlah lulusan pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dari tahun ke tahun terus bertambah disertai mutu pendidikan yang meningkat pula.

Pembangunan kebudayaan telah ditingkatkan melalui antara

lain pembinaan dan pelestarian budaya daerah terutama budaya tradisional dan peninggalan sejarah. Sejalan dengan meningkatnya arus wisatawan yang datang ke daerah, maka budaya daerah yang menjadi obyek wisata sekaligus memberikan dampak positif terhadap aspek perekonomian daerah dibina dan dilestarikan.

3. Pembangunan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah berhasil meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan suasana kehidupan beragama yang makin semarak, menanamkan dan membina kerukunan antar intern umat beragama, antara umat beragama, dan antara umat beragama dan pemerintah.

Namun, tantangan yang masih dihadapi dan perlu penanganan lebih lanjut yaitu kedalaman pengamalan ajaran dan nilai-nilai agama serta kemantapan kehidupan beragama dalam rangka mengukuhkan landasan spiritual, moral, dan etik bagi pembangunan serta landasan persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Pemanfaatan pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi selama Pelita Kelima telah dapat memajukan kecerdasan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi tepat guna perlu ditingkatkan guna memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi secara efisien dan efektif. Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta memiliki banyak perguruan tinggi dan lembaga penelitian mempunyai peluang cukup besar dalam pembangunan llmu Pengetahuan dan teknologi.
5. Pembangunan hukum yang telah digariskan secara Nasional maupun Daerah selama Pelita Kelima telah dilaksanakan berbagai kegiatan pembangunan hukum baik produk-produk hukum di daerah maupun pembangunan sarana, prasarana dan peningkatan kualitas aparat hukum. sehingga landasan dan ketaatan hukum makin meningkat. Di lain pihak tuntutan masyarakat terhadap kepastian dan pengayoman hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran meningkat lebih cepat, sehingga pembangunan hukum perlu sungguh-sungguh diperhatikan.
6. Pembangunan politik telah berhasil meningkatkan stabilitas politik lebih mantap dan dinamis. Meskipun demikian supra dan infrastruktur politik termasuk mekanisasi komunikasi politik yang mengkait keterbukaan yang bertanggungjawab berlandaskan Demokrasi Pancasila serta perluasan pendidikan politik masih perlu mendapat perhatian.

Pembangunan aparatur telah dapat ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Meskipun demikian aparatur pemerintah makin dituntut untuk lebih peka dalam menanggapi dinamika masyarakat terutama pelayanan yang merata. Disamping itu arus komunikasi timbal balik dan media massa yang makin berkembang makin menumbuh-kembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

7. Pembangunan ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagai bagian integral Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat telah berhasil mendukung terciptanya stabilitas daerah yang dinamis dalam aspek-aspek kehidupan yang mendukung penyelenggaraan pembangunan. Pembangunan ketentraman dan ketertiban masyarakat, masih memerlukan perhatian agar senantiasa tetap mampu mengemban fungsi daya tangkal yang tangguh dan mantap. Pelaksanaan peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik melalui pelaksanaan fungsi stabilisator dan dinamisatornya telah berhasil menumbuh-kembangkan kehidupan Demokrasi Pancasila.

Masalah-masalah yang belum dapat terselesaikan pada Pelita Kelima masih perlu diselesaikan antara lain:

- a. Kepadatan penduduk yang tinggi dan tidak merata
- b. Terpusatnya pelayanan kegiatan.
- c. Sistem lalu-lintas yang belum mantap.
- d. Kualitas lingkungan yang masih kurang memadai.
- e. Masih terdapatnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
- f. Laju pertumbuhan angkatan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan lapangan kerja dan kesempatan kerja.
- g. Rendahnya kualitas dan tingkat kesejahteraan sebagian tenaga kerja.
- h. Aspek sosial, budaya dan ekonomi sebagai akibat urbanisasi dan bertemunya berbagai bangsa/suku di wilayah kota. Selain itu adanya nilai-nilai baru yang datang dari luar belum tentu sesuai dengan budaya daerah.
- i. Prasarana dan sarana pemerintahan yang belum memadai.
- j. Keterbatasan pendapatan asli daerah.

B. Tujuan Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah

1. Menumbuhkan sikap dan tekad kemandirian manusia dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin yang selaras, adil dan merata.
2. Memantapkan predikat Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagai kota budaya, perjuangan, pendidikan

dan wisata dengan meningkatkan peranan, partisipasi dan tanggungjawab masyarakat dalam pembangunan.

3. Memantapkan fungsi Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan, pertumbuhan dan pengembangan wilayah, pelayanan transportasi dan perdagangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan memanfaatkan kedudukan dan letak strategis yang dimiliki.
4. Meningkatkan citra Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sesuai dengan kondisi dan potensi daerah serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selaras, serasi dan seimbang dengan kepribadian dan budaya masyarakat dalam rangka mewujudkan Yogyakarta Berhati Nyaman.
5. Meletakkan landasan pembangunan yang mantap untuk tahap pembangunan berikutnya.

C. Sasaran Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah

Sasaran Umum :

Sasaran Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah adalah tumbuhnya sikap kemandirian dalam diri warga dan masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta melalui peningkatan peran serta, efisiensi dan produktivitas masyarakat dalam rangka peningkatan tarat hidup, kecerdasan dan kesejahteraan lahir batin.

a. industri

- 1) Meningkatnya kuantitas dan kualitas industri kecil dan menengah termasuk industri kerajinan dan rumah tangga dalam menumbuhkan, kemampuan, kemandirian berusaha dan memperluas lapangan kerja.
- 2) Meningkatnya keterkaitan serta kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar serta antara sektor industri dengan sektor lainnya untuk mewujudkan struktur ekonomi yang mantap.
- 3) Terwujudnya industri khususnya yang bersifat padat modal dan teknologi tinggi dengan tetap menjaga kualitas lingkungan.

b. Pertanian

- 1) Berkembangnya tanaman hortikultura, peternakan dan perikanan dalam menunjang kebutuhan daerah.
- 2) Berkembangnya pertanian pola perkotaan sesuai dengan pola kehidupan dan tata ekonomi kota untuk

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

c. Tenaga Kerja

- 1) Meningkatnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja serta kesempatan berusaha.
- 2) Meningkatnya kualitas serta produktivitas tenaga kerja, etos kerja dan jiwa wirausaha untuk menciptakan lapangan kerja mandiri.
- 3) Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial serta kesejahteraan tenaga kerja.
- 4) Terwujudnya peran Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang semakin mantap di setiap Perusahaan agar dapat menampung aspirasi pekerja sehingga tercipta hubungan kerja yang serasi, mantap dan dinamis.
- 5) Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja yang menyeluruh dan terpadu.

d. Perdagangan

- 1) Meningkatnya pengendalian pertumbuhan perdagangan secara proporsional.
- 2) Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa sesuai perkembangan wilayah Yogyakarta.
- 3) Meningkatnya perluasan kesempatan berusaha bagi pengusaha golongan ekonomi lemah dengan peningkatan ketrampilan berusaha, bantuan pemasaran serta pembinaan manajemen dengan melibatkan kerjasama pengusaha menengah dan pengusaha besar serta penyediaan tempat berusaha.
- 4) Meningkatnya pemanfaatan informasi pasar, perluasan pasar serta dapat terkendalinya harga yang wajar dan mencegah persaingan tidak sehat etatisme serta berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat.

e. Transportasi

- 1) Terciptanya kelancaran lalu lintas dengan pembangunan jalan kolektor dan lingkungan serta pembangunan jalan tembus.
- 2) Meningkatnya penggunaan jaringan jalan yang tersedia dengan pengamanan fungsi jalan pengaturan lalu lintas secara menyeluruh, penyediaan fasilitas pejalan kaki dan penerangan jalan.

- 3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan angkutan umum dengan menciptakan sistem angkutan kota terpadu.

f. Pertambangan

Terwujudnya usaha-usaha pembatasan penambangan bahan galian jenis c yang dimungkinkan dapat merusak lingkungan.

g. Kehutanan

Terpeliharanya kelestarian sumber daya alam dengan meningkatnya pengembangan hutan kota untuk menjaga tanah, air, udara serta berkembangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan penghijauan.

h. Kedirgantaraan

Meningkatnya pemanfaatan wilayah dan sumber daya dirgantara sebagai frekuensi gelombang radio dan telekomunikasi untuk kepentingan masyarakat.

i. Dunia Usaha

- 1) Meningkatnya kondisi berusaha yang mantap dan efisien dengan jalan memberikan kemudahan-kemudahan, penyediaan, fasilitas dan perijinan yang diperlukan.
- 2) Meningkatnya peranan dan fungsi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta organisasi-organisasi ekonomi lainnya dalam rangka peningkatan usaha swasta terutama golongan ekonomi lemah dengan memberikan kesempatan dalam kegiatan usaha.
- 3) Berkembangnya Dunia Usaha dan meningkatnya kerjasama yang serasi, saling mendukung dan menguntungkan antara usaha negara, swasta dan koperasi.
- 4) Meningkatnya kemampuan keuangan daerah melalui peningkatan dan pengembangan usaha daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

j. Pariwisata

- 1) Berkembangnya obyek-obyek wisata budaya, pendidikan dan konvensi serta kegiatan promosi dan pemasaran untuk meningkatkan jumlah dan lama tinggal wisatawan.
- 2) Meningkatnya reran serta masyarakat dan industri wisata serta kualitas para pelaku dan pengelola

kegiatan kepariwisataan untuk mendukung mutu pelayanan yang semakin meningkat.

- 3) Meningkatnya atraksi wisata yang berkesinambungan dalam bentuk paket-paket wisata yang dikemas dan dikelola secara profesional yang mempunyai daya tarik bagi wisatawan.
- 4) Meningkatnya jumlah wisatawan, lama tinggal dan jumlah pembelanjaannya.

k. Pos dan Telekomunikasi

- 1) Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan jasa pos dan giro, informasi serta meluasnya jangkauan jasa keseluruhan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- 2) Meluasnya sistem jaringan telekomunikasi sesuai dengan kemajuan teknologi dan kecepatan arus komunikasi.
- 3) Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat pos dan telekomunikasi.

l. Koperasi

- 1) Semakin mantapnya keorganisasian, kepengurusan dan keanggotaan koperasi sehingga mampu melaksanakan kegiatan usaha sesuai kondisi ekonomi masyarakat.
- 2) Berkembangnya koperasi sebagai bagian dari sistem ekonomi rakyat yang mandiri dan mampu memberikan manfaat kepada para anggotanya.
- 3) Meningkatnya kesadaran, kegairahan dan kemampuan berkoperasi di seluruh lapisan masyarakat.
- 4) Meningkatnya kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan usaha negara dan usaha swasta yang saling menguntungkan.

m. Pembangunan Daerah

- 1) Meningkatnya pelaksanaan pembangunan secara terpadu antara sektor maupun antar instansi daerah dengan instansi vertikal.
- 2) Meningkatnya prakarsa dan peran serta aktif masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat dan meningkatnya kemampuan manajemen pembangunan seluruh aparatur pemerintah daerah untuk lebih mendayagunakan potensi daerah dan terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan

bertanggung jawab.

- 3) Meningkatnya kerjasama antar daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pengembangan wilayah pembangunan secara serasi dan seimbang.
- 4) Berkembangnya kota Yogyakarta sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan agar terwujud lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, indah dan nyaman serta terlaksananya keterpaduan pembangunan perkotaan dan pedesaan.

n. Keuangan

- 1) Meningkatnya keuangan daerah dari penggalian sumber-sumber yang ada dalam rangka terwujudnya otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab
- 2) Meningkatnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.
- 3) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi termasuk perekonomian rakyat dan meningkatnya taraf hidup rakyat terutama rakyat yang masih berada dalam garis kemiskinan.
- 4) Meningkatnya kemampuan badan usaha milik daerah sebagai salah satu sumber keuangan daerah, dan berkembangnya investasi modal swasta dalam pembangunan daerah.

o. Transmigrasi

- 1) Meningkatnya jumlah transmigran melalui peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk bertransmigrasi secara swakarsa dalam rangka penyaluran tenaga kerja, persebaran penduduk dan menunjang pembangunan daerah.
- 2) Mantapnya koordinasi dan keterpaduan penyelenggaraan transmigrasi antar sektor, antar daerah pengirim dan penerima maupun antara Pemerintah Pusat, Daerah dan Swasta.
- 3) Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan transmigran untuk lebih meningkatkan taraf hidup.

p. Energi

- 1) Meningkatnya sistem pelayanan bahan bakar sebagai jenis energi pencatu utama penggerak kehidupan kota untuk menunjang kegiatan usaha dan kegiatan sosial ekonomi lainnya.

- 2) Terciptanya sistem distribusi energi yang dapat menjamin kontinuitasnya, aman, efisien, mudah diperoleh dan tidak menimbulkan pencemaran, sehingga masyarakat dan lingkungan perkotaan memperoleh manfaat atas pelayanan yang semakin baik.

q. Lingkungan Hidup

- 1) Tercapainya kelestarian lingkungan hidup yang memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dengan memperhatikan daya dukung serta ekosistem sumber daya alam tersebut.
- 2) Meningkatnya kesadaran, peran serta dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat dalam upaya memelihara serta merehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 3) Tercapainya tata lingkungan yang dinamis dalam konsep pembangunan berwawasan lingkungan untuk menjaga ekosistem agar tetap lestari.

2. Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan.

a. Kesejahteraan Sosial

- 1) Meningkatnya usaha-usaha penyantunan dan pengentasan sosial bagi fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, manusia lanjut usia, korban bencana alam dan musibah lainnya serta penyandang masalah sosial lainnya.
- 2) Meningkatnya jumlah panti sosial dan lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang sosial dengan mendorong dan melibatkan warga masyarakat yang mampu.
- 3) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelayanan sosial, kesadaran, kesetiakawanan dan tanggung jawab sosial serta terciptanya iklim yang dapat mendorong kegairahan dan kesediaan masyarakat untuk menjadi pekerja-pekerja sosial.

b. Pendidikan

- 1) Meningkatnya pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta tanah air, mempertebal semangat patriotisme dan rasa kesetiakawanan sosial.
- 2) Meningkatnya pendidikan Pancasila termasuk P4, serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa semangat dan nilai-nilai juang

1945 kepada generasi muda, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar sekolah sejak Taman Kanak-Kanak sampai perguruan tinggi.

- 3) Meningkatnya sistem Tri Pusat Pendidikan yang meliputi lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat dalam rangka pendidikan seumur hidup.
- 4) Meningkatnya pelayanan pendidikan khususnya masyarakat kurang mampu dan penyandang cacat dengan pemberian perhatian khusus dan kesempatan belajar serta peningkatan ketrampilan.
- 5) Meningkatnya pembinaan Pendidikan Luar Sekolah yaitu pendidikan yang bersifat kemasyarakatan, termasuk kepramukaan, latihan-latihan dan pembinaan terhadap kelompok masyarakat yang bebas dari buta aksara dan angka serta pengetahuan umum.
- 6) Meningkatnya pelayanan terhadap usaha perluasan dan peningkatan mutu pendidikan yang mendorong terpenuhinya tenaga-tenaga yang cakap dan trampil di berbagai jenjang pendidikan.
- 7) Meningkatnya keterkaitan dan kesepadanan antara lapangan kerja dan pendidikan.
- 8) Meningkatnya kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi untuk kesejahteraan masyarakat.

c. Kebudayaan

- 1) Terwujudnya nilai-nilai budaya yang tetap mencerminkan kepribadian budaya yang luhur.
- 2) Terbinanya kelestarian berbagai budaya daerah terutama budaya tradisional.
- 3) Terpeliharanya peninggalan sejarah, bangunan-bangunan yang mempunyai nilai sejarah serta museum-museum yang ada.
- 4) Terpeliharanya dan terbinanya bahasa dan tulisan daerah untuk memperkaya kebudayaan nasional.
- 5) Meningkatnya kesatuan dan persatuan bangsa melalui pembinaan pendidikan bahasa Indonesia.

d. Kesehatan

- 1) Meningkatnya usaha pelayanan kesehatan pada masyarakat melalui Puskesmas, Rumah Sakit dan lembaga kesehatan lainnya dengan mutu pelayanan yang lebih dan biaya yang dapat dijangkau oleh

masyarakat.

- 2) Terbinanya masyarakat terutama generasi muda agar terhindar dari pemakaian obat-obat terlarang dan berkembangnya obat tradisional sebagai warisan luhur bangsa kita.
- 3) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat usia harapan hidup dan menurunnya angka kesakitan serta kematian.

e. Keluarga Sejahtera

- 1) Semakin mantapnya kesadaran masyarakat untuk keikutsertaannya dalam mengikuti program keluarga berencana.
- 2) Meningkatnya peserta keluarga Berencana secara mandiri merupakan salah satu kebutuhan dalam rangka mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera.
- 3) Meningkatnya peran serta masyarakat dan swasta untuk mendukung gerakan keluarga berencana.

f. Kependudukan

- 1) Meningkatnya kualitas penduduk sebagai subyek dan obyek pembangunan.
- 2) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dengan menekan angka kelahiran serta meningkatnya migrasi keluar.

g. Anak dan Remaja

- 1) Meningkatnya kualitas hidup anak dan remaja
- 2) Meningkatnya mutu gizi, pembinaan kehidupan beragama, budi pekerti luhur, pendidikan dan ketrampilan serta cinta tanah air.
- 3) Meningkatnya pembinaan anak dan remaja dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

h. Pemuda

- 1) Meningkatnya peran serta pemuda sebagai pelaksana pembangunan yang dapat lebih menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu menghadapi tantangan dan bertanggung jawab terhadap keikutsertaannya dalam pembangunan.
- 2) Meningkatnya peran serta pemuda dalam kehidupan politik untuk menegakkan nilai-nilai Demokrasi Pancasila, dengan lebih memantapkan fungsi dan

peranan wadah kepemudaan.

- 3) Terbentuknya pemuda Indonesia menjadi kader bangsa yang tangguh yang memiliki wawasan kebangsaan yang luas dan utuh dalam kehidupan politik nasional untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi Pancasila.

i. Peranan Wanita dalam Pembangunan Daerah

- 1) Meningkatnya peranan wanita dalam pembangunan selaras dan serasi dengan tanggung jawab dan peranannya dalam mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya.
- 2) Meningkatnya usaha kesejahteraan keluarga antara lain melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sehingga dapat mendorong peran serta wanita dalam pembangunan.

j. Perumahan dan Permukiman

- 1) Mengoptimalkannya penggunaan lahan untuk pembangunan perumahan.
- 2) Tersedianya perumahan dan permukiman dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat terutama golongan berpenghasilan rendah dan menengah.
- 3) Meningkatnya kondisi dan penataan lingkungan permukiman, khususnya di daerah yang kurang layak huni.
- 4) Berkembangnya sistem pengelolaan dan pemberian fasilitas baik kepada penduduk, swadaya masyarakat maupun usaha swasta dalam rangka usaha perbaikan pemugaran dan pembangunan rumah/lingkungan permukiman.
- 5) Meningkatnya penyediaan fasilitas sosial dan ekonomi serta prasarana lingkungan, termasuk penanganan air bersih, air hujan, air limbah dan persampahan.

k. Olah Raga

- 1) Meningkatnya kualitas masyarakat baik kesehatan jasmani, rohani maupun mental dengan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.
- 2) Meningkatnya Prestasi olahragawan baik prestasi tingkat regional, nasional maupun internasional serta meningkatnya kesejahteraan olahragawan yang

berprestasi.

- 3) Tersedianya sarana dan prasarana olahraga latihan yang memadai serta terdukungnya pembangunan keolahragaan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

3. Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

- a. Meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan umat beragama terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Meningkatnya kerukunan kehidupan umat beragama baik secara pribadi maupun sebagai anggota sosial masyarakat.
- c. Terbinanya penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Meningkatnya mutu pelayanan dan kelancaran penunaian ibadah haji.
- e. Berkembangnya sarana dan prasarana kehidupan beragama.

4. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- a. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan meningkatnya penguasaan teknologi dalam pembangunan daerah.
- b. Meningkatnya teknologi tepat guna mendukung kegiatan pembangunan daerah.
- c. Meningkatnya pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembangunan daerah.

5. Bidang Hukum

- a. Terbentuk dan berfungsinya produk hukum yang mengayomi dan memberikan landasan hukum bagi kegiatan masyarakat, pemerintahan dan pembangunan.
- b. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.
- c. Meningkatnya kualitas aparatur hukum yang mampu menjamin kepastian, penegakan dan perlindungan hukum.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana hukum yang memadai.

6. Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa

a. Politik

- 1) Meningkatnya perwujudan Demokrasi Pancasila, Stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta

partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila.

- 2) Meningkatnya pemasyarakatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat.
- 3) Meningkatnya arus komunikasi timbal balik antara masyarakat, lembaga perwakilan rakyat dan Pemerintah.

b. Aparatur Pemerintah

- 1) Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas aparatur pemerintah serta pengabdian, disiplin dan keteladanannya dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
- 2) Meningkatnya hubungan kerja yang serasi, selaras dan terpadu antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat maupun antara Pemerintah Daerah dengan Instansi/Lembaga pusat yang ada di Daerah.

c. Penerangan, Komunikasi dan Media Massa :

- 1) Meningkatnya peranan pers dalam pembangunan menuju pers Pancasila dengan mengembangkan pers yang sehat, bebas dan bertanggung jawab serta interaksi positif antara pers pemerintah dan masyarakat.
- 2) Meningkatnya pemanfaatan media penerangan untuk menyampaikan informasi timbal balik.

7. Bidang Pertahanan Keamanan.

- a. Meningkatnya penanganan keamanan dan ketertiban di segala lapisan masyarakat.
- b. Meningkatnya pembinaan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan sistem keamanan dan ketertiban rakyat.
- c. Meningkat dan berkembangnya kemandirian ABRI dan Rakyat untuk mensukseskan pembangunan.

D. Prioritas Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah.

1. Pembangunan bidang ekonomi diprioritaskan pada sektor industri, sektor jasa, Perdagangan dan transportasi dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sedangkan sektor pemerintah akan mendapat prioritas untuk lebih memantapkan predikat dan fungsi Kotamadya

Daerah Tingkat II Yogyakarta. Pembangunan bidang ekonomi dilaksanakan secara berwawasan lingkungan.

2. Pembangunan sumber daya manusia agar makin meningkat kualitasnya, sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dengan pendidikan yang makin merata dan bermutu disertai peningkatan dan perluasan pendidikan keahlian yang dibutuhkan berbagai bidang pembangunan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin mantap.
3. Pembangunan bidang lainnya terus ditingkatkan selaras dan serasi serta saling memperkuat dengan pembangunan bidang ekonomi sehingga keseluruhan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan gerak dalam mewujudkan masyarakat maju, mandiri dan sejahtera.

E. Kebijakan

1. Bidang Ekonomi

a. Industri

- 1) Peningkatan kuantitas dan kualitas industri kecil dan menengah termasuk industri industri kerajinan dan rumah tangga diupayakan dengan pembinaan melalui pendidikan dan latihan, seminar dan sarasehan serta dukungan peran swasta dan masyarakat, khususnya dalam menunjang modal dan pemasaran.
- 2) Peningkatan keterkaitan serta kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar serta antara sektor industri dengan sektor lainnya dilakukan dengan saling mendukung antar sektor, antar strata usaha dan kesempatan berusaha.
- 3) Pembangunan industri padat modal dan teknologi tinggi diarahkan selalu memelihara kelestarian fungsi lingkungan, mengusahakan limbah industri yang sekecil-kecilnya serta adanya treatment sehingga limbah buangan sesuai standard baku mutu lingkungan.

b. Pertanian.

- 1) Pengembangan tanaman hortikultura diarahkan pada tanaman bernilai ekonomis yang memanfaatkan lahan terbatas.
- 2) Pengembangan peternakan diarahkan pada usaha aneka ternak dalam rangka mencukupi kebutuhan

protein hewani, melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian kualitas serta pengaruhnya pada lingkungan.

- 3) Pengembangan perikanan diarahkan pada usaha agri bisnis dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia.
- 4) Pembangunan pertanian diarahkan untuk memantapkan pelaksanaan pertanian pola perkotaan yang mencakup beberapa aspek pembangunan, yakni aspek ekonomi mampu mendukung peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, aspek konservasi mampu mendukung kelestarian sumber daya alam dan perbaikan kualitas lingkungan hidup, aspek estetika mampu menciptakan keindahan untuk mendukung kegiatan wisata dan aspek edukasi mampu mendukung kegiatan sektor pendidikan.

c. Tenaga Kerja

- 1) Penciptaan dan perluasan tenaga kerja serta kesempatan berusaha dilakukan melalui pendayagunaan dan penyaluran tenaga kerja yang lebih seimbang antara daerah dan antar sektor, yang didukung informasi pasar kerja dan perencanaan tenaga kerja daerah yang bersifat menyeluruh dan terpadu.
- 2) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, etos kerja dan jiwa wirausaha maka kegiatan penyuluhan, pendidikan dan latihan tenaga kerja lebih ditingkatkan. Peningkatan kualitas tenaga kerja merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta.
- 3) Perlindungan tenaga kerja meliputi hak berserikat, keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial tenaga kerja yang mencakup jaminan hari tua, perbaikan kesehatan kecelakaan kerja dan kematian perlu ditingkatkan dengan memperhatikan kondisi perekonomian, lapangan kerja, pemberi kerja dan kemampuan tenaga kerja, khusus bagi tenaga kerja wanita perlu diberikan perhatian dan perlindungan sesuai kodrat, harkat dan martabatnya.
- 4) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan mengurangi kesenjangan sosial maka kebijaksanaan pengupahan dan penggajian tenaga kerja pada setiap sektor tenaga kerja

didasarkan pada kebutuhan hidup yang layak dengan memperhatikan prestasi dan produktivitas kerja.

- 5) Dalam rangka mewujudkan peran Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang semakin mantap di setiap perusahaan maka pembinaan dan pengawasan terhadap norma dan syarat kerja, kesehatan dan keselamatan kerja serta penanganan perselisihan hubungan kerja lebih ditingkatkan sehingga lebih memantapkan hubungan industrial Pancasila.

d. Perdagangan.

- 1) Pembangunan perdagangan diarahkan untuk mencegah berbagai bentuk monopoli, persaingan yang tidak sehat dan bentuk pemasaran lain yang merugikan rakyat.
- 2) Peranan Koperasi, pemilik modal, perkreditan dan bapak angkat terus ditingkatkan, sehingga pemasaran dapat berjalan dengan lancar dan berkesinambungan serta menjaga kestabilan harga.
- 3) Peningkatan dan pertumbuhan perdagangan diutamakan pada komoditi ekspor non migas untuk keperluan pasar dalam maupun luar negeri, baik kontinuitas dan kualitasnya maka perlu ditunjang dengan tenaga yang lebih berkualitas melalui pendidikan, pelatihan, seminar, serta informasi pasar yang kontinue dan kemudahan perijinan dalam pengembangan usaha.
- 4) Pembangunan perdagangan diarahkan dalam upaya memperluas lapangan kerja baru dan pemeratakan hasil pembangunan, mendorong dan membantu pengusaha kecil golongan ekonomi lemah, usaha informal dan tradisional yang merupakan potensi ekonomi rakyat melalui penciptaan iklim yang mendukung peningkatan bimbingan penyuluhan serta penyebarluasan informasi perdagangan.

e. Transportasi

- 1) Transportasi perkotaan terus dikembangkan dan ditingkatkan kualitas, kuantitas dan kenyamanannya agar kemacetan dan gangguan lalu lintas dapat dihindarkan serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dirasakan secara meluas.

- 2) Pembangunan transportasi harus dilaksanakan secara terpadu dan searah dinamika pembangunan untuk lebih memantapkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan hamkam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana transportasi, agar mampu beroperasi secara optimal untuk memenuhi keperluan jasa transportasi dalam rangka menunjang kebutuhan sosial masyarakat, baik secara regional, nasional maupun internasional.

f. Pertambangan

Usaha penambangan bahan galian c dikendalikan agar tidak merusak lingkungan hidup.

g. Kehutanan

Pengetahuan dan ketrampilan masyarakat ditingkatkan melalui pelatihan, kursus, sarasehan dan seminar untuk mewujudkan hutan kota sebagai salah satu faktor penentu ekosistem lingkungan.

h. Kedirgantaraan

Pengamanan terhadap pencemaran udara ditingkatkan untuk memanfaatkan sumber daya dirgantara sebagai telekomunikasi yang merupakan salah satu sarana informasi.

i. Dunia Usaha

- 1) Kemudahan, kecepatan dan kecermatan dalam pelayanan perijinan yang berkaitan dengan usaha-usaha sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku ditingkatkan untuk pengembangan dan peningkatan usaha swasta dalam rangka pembangunan daerah termasuk dari penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk mendukung pembangunan diberbagai kegiatan yang belum mampu sepenuhnya dilaksanakan dengan modal daerah.
- 2) Pembinaan Kadin yang meliputi Koperasi, Perusahaan Daerah dan Usaha Swasta diarahkan agar tumbuh menjadi kegiatan usaha yang mampu sebagai penggerak utama untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.

- 3) Perusahaan Daerah terus dipupuk dan dikembangkan melalui peningkatan bimbingan teknis, informasi pasar, peningkatan kemampuan berproduksi, kemampuan bersaing dalam pemasaran sehingga dapat mempercepat kemandirian berusaha.
- 4) Pembinaan usaha ekonomi rakyat diutamakan pada pengembangan kewiraswastaan, penyediaan sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan dan latihan bimbingan dan penyuluhan serta permodalan agar dapat meningkatkan usahanya, tumbuh menjadi unsur kekuatan ekonomi yang handal dan mandiri serta mampu berperan dalam menciptakan lapangan kerja.

j. Pariwisata

- 1) Pengembangan obyek-obyek wisata budaya, pendidikan dan konvensi serta kegiatan promosi dan pemasarannya terus ditingkatkan dengan memanfaatkan secara optimal kerjasama kepariwisataan regional.
- 2) Peran serta masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan ditingkatkan dengan pembinaan dan penyuluhan terhadap kelompok seni budaya dan industri wisata.
- 3) Kualitas para pelaku dan pengelola kegiatan kepariwisataan ditingkatkan dengan pendidikan dan latihan, seminar maupun pertemuan disertai penyediaan sarana dan prasarana yang semakin baik serta suasana nyaman dan keamanan yang memadai.

k. Pos dan Telekomunikasi

- 1) Pembangunan pos dan giro ditujukan untuk mendukung peningkatan pembangunan daerah, khususnya untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dengan semakin memperlancar arus surat, uang, barang dan informasi.
- 2) Pembangunan pos terus ditingkatkan supaya jangkauan pelayanan semakin luas dengan meningkatkan armada pos keliling sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang menjamin terselenggaranya arus surat, barang dan jasa giro dengan lancar, cepat dan aman.
- 3) Pembangunan telekomunikasi terus dikembangkan menjadi wahana yang dapat diandalkan untuk

kelancaran kegiatan ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan. Jaringan dan jangkauan telekomunikasi terus ditingkatkan dengan menggunakan teknologi maju yang sesuai disertai peningkatan mutu dan efisien pelayanan.

- 4) Pembangunan pos dan telekomunikasi terus dilakukan dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia guna oleh pemanfaatan, penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sarana pos dan telekomunikasi.

l. Koperasi

- 1) Dalam rangka menumbuhkembangkan perkoperasian yang mandiri maka manajemen, pengetahuan, ketrampilan dan pembinaan terhadap anggota dan masyarakat terus ditingkatkan melalui pendidikan, latihan, bimbingan, penyuluhan dan pemasyarakatan koperasi.
- 2) Modal koperasi terus ditingkatkan dengan peran serta anggota dan masyarakat melalui simpanan pokok, wajib sukarela maupun hibah serta pinjaman dari anggota dan perbankan untuk memenuhi kebutuhan para anggota dan bukan anggota.
- 3) Pengelolaan usaha koperasi dilakukan secara produktif, efektif dan efisien untuk meningkatkan nilai tambah disegala bidang kegiatan usaha kehidupan ekonomi masyarakat. Selain itu peran serta mitra usaha terus ditingkatkan untuk meningkatkan hasil usaha koperasi.
- 4) Koperasi sebagai salah satu wadah kegiatan ekonomi rakyat terus ditumbuhkembangkan semakin nyata, meluas dan menjadi ekonomi rakyat yang handal, mandiri dan maju untuk menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

m. Pembangunan Daerah

- 1) Pembangunan Daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional harus dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diharapkan untuk mengembangkan daerah sesuai dengan prioritas dan potensi wilayah, serta memperhatikan perencanaan kota.

- 2) Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, prakarsa dan peran serta aktif masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat terus ditingkatkan, begitu pula dengan fungsi lembaga-lembaga yang ada daerah. Pengawasan dan koordinasi pembangunan makin dimantapkan serta fungsi lembaga perwakilan daerah lebih didayagunakan sebagai perwujudan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Kemampuan manajemen pembangunan seluruh aparatur pemerintah daerah terus ditingkatkan untuk lebih mendayagunakan potensi daerah dan mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab. Sejalan dengan itu perlu terus ditingkatkan kemampuan daerah dalam membangun dengan upaya menghimpun sumber-sumber dana secara seimbang dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat.
- 3) Kerjasama antar daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pengembangan wilayah perlu terus ditingkatkan agar daerah-daerah dalam satu wilayah pembangunan dapat tumbuh secara serasi dan pemecahan masalah-masalah wilayah dapat dilakukan bersama-sama.
- 4) Pembangunan perkotaan dan pedesaan ditingkatkan dan dilaksanakan secara berencana dan terpadu dengan memperhatikan rencana tata ruang, pertumbuhan penduduk, lingkungan pemukiman, lingkungan usaha dan lingkungan kerja, serta kegiatan ekonomi dan sosial agar terwujud lingkungan yang bersih, sehat, indah dan nyaman serta tetap menjaga nilai sosial budaya yang mencerminkan kepribadian Yogyakarta.

n. Keuangan

- 1) Penerimaan daerah yang berasal dari perpajakan dan lain-lain harus selalu digali dan ditingkatkan dengan prosedur yang mudah, sederhana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memenuhi pembiayaan belanja rutin maupun pembangunan.
- 2) Kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi secara jujur, tepat waktu dan bertanggung jawab terus ditingkatkan dan diimbangi dengan peningkatan pelayanan, pemberian motivasi, penyuluhan, latihan,

pendidikan dan penerangan bagi masyarakat maupun petugas.

- 3) Pembangunan keuangan diarahkan untuk mendorong tumbuhnya inisiatif dan kreatifitas masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat, swasta dan pemerintah dalam pembangunan. Di samping itu diarahkan untuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya makin meluas guna mengentaskan kemiskinan rakyat serta mendorong pertumbuhan ekonomi pada seluruh wilayah.
- 4) Badan-badan Usaha milik daerah terus ditingkatkan efisiensi dan produktifitasnya sehingga makin mampu berperan dalam pembiayaan pembangunan. Di samping itu peran aktif investor, pasar modal, asuransi, perbankan dan pemilik-pemilik modal yang lain lebih ditingkatkan agar peranan dalam menampung dan menyalurkan dana kemasyarakatan dalam pembangunan lebih cepat dan merata.
- 5) Keuangan daerah tetap didasarkan pada prinsip anggaran berimbang dan dinamis serta dimungkinkan adanya dana cadangan untuk mendukung terjaminnya kesinambungan pembiayaan terhadap program yang telah direncanakan dan sangat mendesak serta dalam pelaksanaannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Pengeluaran daerah perlu direncanakan secara cermat berdasarkan skala prioritas sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah, dalam rangka peningkatan fungsi pelayanan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan.

o. Transmigrasi

- 1) Pembangunan Transmigrasi selain dilaksanakan transmigrasi umum perlu makin ditingkatkan transmigrasi swakarsa dengan lebih mendorong tumbuhnya peranan dan tanggung jawab swasta dan masyarakat melalui program transmigrasi dengan berbagai pola yang ada pemberian informasi penerangan sehingga lebih meningkatkan wawasan nusantara bagi masyarakat.
- 2) Penyelenggaraan transmigrasi terus disempurnakan dan ditingkatkan pelayanannya melalui peningkatan koordinasi antar sektor

antara daerah asal dan daerah tujuan serta antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang lebih terpadu sehingga lebih memperlancar dan memperbesar jumlah transmigran.

- 3) Dalam rangka lebih meningkatkan keberhasilan dan kesejahteraan transmigran perlu diberikan bekal melalui pendidikan dan pelatihan ketrampilan serta bantuan peralatan yang produktif sehingga mampu mengembangkan usaha dan menjamin kehidupan keluarga yang lebih mantap.

p. Energi

- 1) Pembangunan energi ditingkatkan terutama dalam diversifikasi penggunaan energi selain bahan bakar minyak (BBM), gas bumi dan listrik untuk mendorong terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat yang lebih baik, hemat dan mengacu pada wawasan lingkungan hidup.
- 2) Peran serta masyarakat, koperasi, Badan Usaha Swasta maupun Pemerintah dalam pendistribusian energi secara terpadu terus ditingkatkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan pembangunan wilayah.

q. Lingkungan Hidup

- 1) Pembangunan lingkungan hidup ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan memanfaatkan sumber daya alam secara serasi, selaras, seimbang dan bersifat berkelanjutan dengan merehabilitasi kerusakan lingkungan, pengendalian, dampak negatif dan pengembangan dampak positif.
- 2) Peran serta masyarakat terus ditingkatkan melalui pemasyarakatan peraturan perundang-undangan lingkungan, pembinaan, penyuluhan, pendidikan, latihan bagi masyarakat dan petugas disertai dorongan aktif masyarakat dalam berbagai aktivitas sosial, ekonomi dan budaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- 3) Pengendalian limbah cair, padat dan gas sebagai unsur-unsur pencemaran, perlu ditingkatkan dengan memperhatikan aspek-aspek ekologi, yang merupakan bagian dari komponen tata lingkungan dalam mencapai lata lingkungan yang dinamis.

2. Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan

a. Kesejahteraan Sosial

- 1) Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin, sehingga kesenjangan sosial dapat diperkecil.
- 2) Pelayanan sosial terhadap fakir miskin, penduduk usia lanjut yang terlantar, penyandang cacat, korban penyalahgunaan obat dan narkoba, korban bencana alam dan bencana lain, serta masyarakat pada daerah kurang layak huni harus ditingkatkan dan diupayakan mendapatkan kesempatan berusaha dan bekerja sehingga terwujud kemandirian dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Melaksanakan pembangunan panti-panti sosial dan lembaga-lembaga lain yang bergerak dibidang sosial sehingga mampu memberikan pelayanan dan penampungan secara lebih mandiri bagi yang membutuhkan serta mendorong dan melibatkan warga masyarakat yang mampu berperan serta menangani masalah sosial.
- 4) Dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan sosial peran serta dari rasa gotong-royong masyarakat, profesional lembaga sosial, serta organisasi sosial masyarakat yang lain perlu ditingkatkan secara terpadu untuk melaksanakan pembangunan dalam menuju ke arah kemandirian.

b. Pendidikan

- 1) Pembangunan pendidikan ditujukan pada pemerataan peningkatan kualitas pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti, berkepribadian, mandiri, cerdas, trampil, berdisiplin, bertanggung jawab secara profesional. Untuk itu iklim belajar mengajar yang dapat menimbulkan rasa percaya diri dengan budaya belajar di kalangan masyarakat terus dikembangkan agar tumbuh sikap dan perilaku yang kreatif, inovatif dengan keinginan untuk maju.
- 2) Peningkatan pendidikan Pancasila termasuk pendidikan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), pendidikan moral

pancasila serta kursus-kursus yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa dan semangat nilai-nilai 1945 kepada generasi muda perlu dilaksanakan di dalam maupun di luar kurikulum sekolah mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan perguruan Tinggi. Pembudayaan pancasila diseluruh lapisan masyarakat perlu makin diperluas, ditingkatkan dan dimantapkan usaha-usaha penghayatannya.

- 3) Pendidikan luar sekolah termasuk pendidikan yang bersifat kemasyarakatan seperti kepramukaan, kelompok belajar, berbagai kursus dan latihan ketrampilan, perlu ditingkatkan kualitasnya dan diperluas dalam rangka mengembangkan sikap mental, minat, bakat, ketrampilan dan kemampuan anggota masyarakat serta menyiapkan dan memberi bekal kepada warga belajar agar mampu bekerja dan berwira usaha serta meningkatkan martabat dan kualitas kehidupannya.
- 4) Pendidikan, pengadaan dan pembinaan guru serta tenaga kependidikan lainnya pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- 5) Dalam rangka mengembangkan kepribadian nasional, maka pendidikan seumur hidup yang dilaksanakan melalui lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat perlu didorong dan dikembangkan terus menerus dengan pendekatan sikap "Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani". Dengan demikian pendidikan tetap merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.

c. Kebudayaan

- 1) Pembangunan kebudayaan daerah ditujukan untuk meningkatkan dan memberikan wawasan kebudayaan daerah yang luhur dan memperkuat jati diri daerah-daerah serta masyarakat, sehingga lebih mampu menyaring terhadap pengaruh kebudayaan asing dan teknologi modern yang mudah menimbulkan dampak negatif. Kelestarian budaya daerah terutama kesenian tradisional peninggalan sejarah dan tradisi-tradisi daerah yang khas terus ditingkatkan, tumbuhkan dan diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan sesuai dengan perkembangan teknologi dan pengaruh nilai budaya asing yang positif dengan tujuan menumbuhkan cipta seni baru dan

memperkaya kasanah kesenian daerah.

- 2) Pengembangan Kebudayaan bangsa ditujukan untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk mengangkat nilai-nilai budaya daerah yang luhur dan menyerap nilai-nilai dari luar yang positif yang diperlukan bagi pembaharuan. Dalam proses pembangunan perlu dicegah sikap feodal, eksklusif dan paham kedaerahan yang sempit.
- 3) Dalam rangka mendukung pembangunan daerah perlu terus diciptakan suasana yang mendorong tumbuh dan berkembangnya sikap kerja keras, mandiri, disiplin, sikap menghargai prestasi, berani bersaing, mampu menyesuaikan diri dan kreatif. Perlu terus ditumbuhkan budaya menghormati dan menghargai orang yang lebih tua, budaya belajar, budaya ingin maju, tenggang rasa, musyawarah untuk mufakat, berwawasan masa depan, jujur dan ksatria, hemat, cermat, sederhana, tertib, menghargai waktu serta penuh pengabdian. Perlu juga terus ditumbuhkan sikap budaya yang mendukung upaya pembaharuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehubungan dengan itu perlu dikembangkan pranata sosial budaya yang dapat mendukung proses pemantapan budaya bangsa dan daerah, serta mengembangkan iklim budaya yang dapat menopang tumbuhnya kreatifitas yang sehat bagi para seniman.
- 4) Pemeliharaan, pembinaan dan pelestarian tradisi serta peninggalan sejarah termasuk kawasan cagar budaya yang mempunyai nilai-nilai perjuangan bangsa dan kebanggaan nasional ditujukan untuk memupuk memperkaya serta memperkuat kepribadian nasional.
- 5) Pemantapan dan pengembangan kesenian tradisional dan kreasi baru yang bernafaskan kepribadian nasional ditujukan untuk memperkaya khasanah budaya bangsa dan menunjang pariwisata. Untuk itu perlu ditingkatkan pembinaan dan penyediaan fasilitas, penyelenggaraan berbagai festival seni budaya serta perhatian yang lebih besar terhadap budayawan termasuk seniman yang berprestasi perlu diberikan penghargaan.
- 6) Pembauran merupakan bagian proses pembudayaan bangsa yang terus diupayakan kearah positif dan harus dijiwai sikap mawas diri, tahu diri, tenggang rasa, solidaritas sosial ekonomi

serta rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kebersamaan dan kesetia kawan dalam upaya memajukan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dalam penyelenggaraannya harus dapat mencegah dan menghilangkan melebarnya kesenjangan sosial ekonomi dan sikap eksklusif serta harus memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memantapkan perwujudan wawasan nusantara dan ketahanan sosial.

- 7) Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia terus ditingkatkan. Dalam penggunaannya dilakukan secara baik, benar dan penuh kebanggaan serta perlu semakin dimasyarakatkan sehingga menjadi wahana komunikasi sosial dan ilmu pengetahuan yang mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mendukung pembangunan bangsa. Di samping itu dalam rangka memperkaya bahasa dan kesusastraan perlu didorong penulisan karya-karya sastra.
- 8) Pembinaan bahasa daerah perlu terus dilanjutkan dalam rangka mengembangkan serta memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan khasanah kebudayaan nasional sebagai salah satu unsur jati diri dan kepribadian bangsa. Perlu ditingkatkan penelitian pengkajian dan pengembangannya melalui berbagai media.
- 9) Penguasaan bahasa asing perlu ditingkatkan dan dikembangkan untuk memperlancar komunikasi dengan bangsa lain disegala aspek kehidupan terutama penyerapan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi sejalan dengan kebutuhan pembangunan.

d. Kesehatan

- 1) Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas kehidupannya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Pengadaan dan peningkatan prasarana dan sarana kesehatan perlu terus dikembangkan kualitasnya dengan pemenuhan dan peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga medis, paramedis dan penunjang kesehatan lainnya serta penyediaan obat dan alat kesehatan yang makin merata dengan harga yang terjangkau.
- 2) Perbaikan kesehatan masyarakat diupayakan melalui pencegahan dan pemberantasan penyakit

menular, penyehatan lingkungan pemukiman, perbaikan gizi dan penyediaan air bersih, penyuluhan kesehatan serta pelayanan kesehatan ibu dan anak.

- 3) Perlindungan terhadap bahaya penyalahgunaan obat dan narkotika perlu ditingkatkan, demikian pula pencermatan terhadap obat, makanan, minuman serta kesehatan lingkungan perlu mendapat perhatian khusus. Penelitian dan pengembangan kesehatan perlu terus dikembangkan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
- 4) Pengobatan tradisional yang secara medis dapat dipertanggungjawabkan perlu terus dibina dalam rangka perluasan dan pemerataan pelayanan kesehatan. Pemeliharaan dan pengembangan obat tradisional sebagai warisan budaya bangsa perlu terus ditingkatkan dengan penggalan, penelitian, pengujian dan pengembangan serta penemuan obat-obatan baru termasuk budi daya tanaman obat tradisional yang secara medis dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Pengembangan kesehatan masyarakat bertujuan untuk memberikan perhatian kepada penduduk usia lanjut menurunnya angka kesakitan dan kematian dilaksanakan secara terpadu dengan meningkatkan pelayanan baik oleh pemerintah maupun peran serta masyarakat termasuk swasta. Pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan mengindahkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan kelayakan, memberikan perhatian khusus kepada fakir miskin, anak-anak terlantar dan penduduk usia lanjut dengan mengembangkan upaya memasyarakatkan pembiayaan kesehatan oleh masyarakat berdasarkan prinsip gotong royong.

e. Keluarga Sejahtera

- 1) Pembangunan keluarga berencana ditujukan untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
- 2) Pembangunan keluarga sejahtera ditujukan untuk mengembangkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang baik dalam mewujudkan kesejahteraan

lahir dan kebahagiaan batin.

- 3) Gerakan keluarga berencana makin membudaya dan mandiri melalui penyelenggaraan penyuluhan keluarga berencana disertai dengan peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan dengan tetap memperhatikan kesehatan peserta keluarga berencana dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama moral, etik dan sosial budaya masyarakat, sehingga keluarga kecil bahagia dan sejahtera dihayati dan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
- 4) Keikutsertaan perorangan, kelompok masyarakat, pemuka masyarakat, pemuka agama serta pihak-pihak swasta dalam pengelolaan keluarga berencana masih perlu ditingkatkan, dilestarikan melalui penerangan, penyuluhan dan bimbingan serta peningkatan mutu pelayanan.

f. Kependudukan

- 1) Pengelolaan administrasi, pencatatan dan pelaporan serta pengolahan data statistik kependudukan terus ditingkatkan sehingga mampu menjadi sumber data yang dapat diandalkan dalam menunjang perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan diberbagai sektor.
- 2) Kebijaksanaan kependudukan ditekankan pada peningkatan kualitas penduduk sebagai pelaku utama dan peningkatan kualitas penduduk baik kualitas pembangunan fisik dan non fisik perlu ditingkatkan antara lain dilakukan melalui peningkatan kecerdasan, ketrampilan, derajat kesehatan, peningkatan tarat hidup, penciptaan lapangan kerja serta pemeratakan pembangunan dan pendapatan dengan dapat mengembangkan kemampuan dan dapat menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak.
- 3) Pengendalian pertumbuhan penduduk sebagai upaya untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kualitas, kuantitas, persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.
- 4) Pengendalian pertumbuhan penduduk bertujuan untuk menurunkan angka kelahiran melalui pengembangan gerakan keluarga berencana secara mandiri dengan mengarahkan mobilitas penduduk

dan memperhatikan kemampuan daya dukung lahan, transrnigrasi dan pemberian insentif bagi tenaga kerja yang mampu menggairahkan tenaga kerja terdidik dan potensial untuk mengabdikan dan mengembangkan kesempatan usahanya di daerah lain.

- 5) Meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut dan makin panjangnya usia harapan hidup sebagai akibat kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan selama ini, maka bagi mereka yang mempunyai pengalaman, keahlian dan kearifan serta masih potensial perlu diberikan kesempatan untuk berperan dalam pembangunan. Sedangkan bagi mereka yang karena kondisi fisik dan mentalnya sudah tidak memungkinkan perlu mendapat perhatian pemerintah dan masyarakat.
- 6) Dengan masih besarnya penduduk usia produktif dan makin meningkatnya peranan wanita dalam lapangan kerja, perlu tetap dipertahankannya angka kelahiran yang rendah dan perluasan sekaligus penciptaan kesempatan kerja dan berusaha yang sesuai dengan kodrat dan martabatnya sebagai wanita.

g. Anak dan Remaja

- 1) Pembinaan anak dan remaja ditujukan untuk menumbuhkan kembangkan jiwa dan rasa yang sehat melalui peningkatan mutu gizi, pembinaan perilaku kehidupan beragama dan budi pekerti luhur, menumbuhkan minat belajar, peningkatan daya cipta dan daya nalar serta krealifitas, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat serta menumbuhkan idealisme dan patriotisme dalam pembangunan nasional serta pengamalan Pancasila dan peningkatan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan masyarakat.
- 2) Pembinaan anak dimulai sejak anak dalam kandungan ditujukan pada peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak melalui peningkatan mutu gizi, menjaga kesehatan jasmani dan rohani serta ketentraman keluarga dan pemenuhan kebutuhan dasar. Pembinaan anak di bawah usia lima tahun diupayakan terutama dengan meningkatkan gizi anak menanamkan perilaku kehidupan beragama dan berbudi pekerti, luhur serta menumbuhkan daya cipta dan ketrampilan anak.

- 3) Pembinaan anak usia sekolah dilaksanakan melalui peningkatan mutu gizi, pembinaan perilaku kehidupan beragama dan perilaku terpuji, penanamam rasa cinta tanah air, disiplin dan penumbuhan budaya minat baca dan belajar sehingga tercipta daya cipta dan ketrampilan dalam rangka peningkatan kemampuan.
- 4) Pembinaan remaja dilaksanakan melalui peningkatan budi pekerti luhur, keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, gemar belajar dan pelatihan ketrampilan dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 5) Pembinaan anak dan remaja dilaksanakan bersamaan dengan peningkatan kesadaran orang tua rerhadap peranannya sebagai pendidik pertama dan utama serta perhatian anak sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya dengan menciptakan suasana kekeluargaan yang harmonis, sejahtera lahir dan batin.

h. Pemuda

- 1) Pembinaan dan pengembangan pemuda ditujukan untuk meningkatkan kualitas generasi penerus perjuangan bangsa dalam mengisi pembangunan dengan dilandasi ketaqwaan, cita-cita dan budi pekerti luhur sebagai kader pemimpin bangsa yang berjiwa Pancasila dan pelaksana pembangunan, pemuda dituntut untuk lebih menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kreatif, mandiri, disiplin mampu menghadapi tantangan dan bertanggungjawab terhadap keikutsertaan dalam pembangunan, melalui pembinaan, pendidikan dan kaderisasi.
- 2) Keikutsertaan pemuda dalam kehidupan politik bertujuan untuk menumbuh kembangkan jati diri pemuda sebagai penerus cita-cita luhur bangsa terus dimantapkan melalui organisasi sosial politik dan kemasyarakatan sehingga terbentuk kader-kader secara wajar dan berbakat.
- 3) Pembinaan dan pengembangan pemuda menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarkat, pemerintah dan pemuda. Kepeloporan pemuda dalam pembangunan terus ditingkatkan agar pemuda memiliki jiwa kejuangan, keperintisan, kepekaan terhadap lingkungan, disiplin dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab, inovatif, kreatif, ulet, tangguh, jujur, berani dan rela berkorban

dilandasi cinta tanah air.

i. Peranan Wanita dalam Pembangunan Daerah

- 1) Wanita sebagai warga negara maupun sebagai sumber daya manusia pembangunan mempunyai hak dan kewajibannya serta kesempatan yang sama dengan pria dalam pembangunan di segala bidang pembangunan. Pembinaan peranan wanita ditujukan, untuk meningkatkan peran aktif dalam pembangunan, termasuk upaya mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia serta pengembangan anak, remaja dan pemuda dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Peranan wanita dalam pembangunan bangsa perlu terus ditingkatkan sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya.
- 2) Kualitas wanita perlu ditingkatkan melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah melalui gerakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dengan wanita sebagai penggerakannya. Peningkatan peranan wanita dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga dilaksanakan mejalui usaha pengembangan kesadaran orang tua terhadap peranan dan tanggung jawabnya dalam pendidikan anak dan remaja yang bertumpu pada nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Dengan meningkatnya jumlah wanita yang memasuki pasar kerja sehingga diperlukan perluasan berbagai lapangan pekerjaan seiring dengan itu perhatian khusus kepada upaya peningkatan ketrampilan, produktivitas, kesejahteraan dan perlingungan hukum tenaga kerja wanita termasuk yang bekerja di luar negeri terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja, perkembangan karier serta jaminan pelayanan sosial bagi tenaga kerja wanita dan keluarganya dengan memperhatikan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai wanita.

j. Perumahan dan Permukiman

- 1) Pembangunan perumahan dan permukiman baik pembangunan perumahan baru maupun pemugaran

perumahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal baik dalam kuantitas maupun kualitas dalam lingkungan yang sehat serta suasana kehidupan yang aman, damai tentram dan sejahtera. Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat serta menciptakan suasana kerukunan hidup, keluarga dan kesetiakawanan sosial.

- 2) Pembangunan perumahan dan permukiman terus ditingkatkan dan diperluas hingga dapat makin merata dan menjangkau masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan memperhatikan rencana tata ruang dan keterkaitan dengan lingkungan sosial sekitarnya.
- 3) Penyediaan fasilitas sosial dan ekonomi serta prasarana lingkungan termasuk penanganan limbah dan penyediaan air bersih baik di perkotaan maupun pedesaan perlu terus ditingkatkan.
- 4) Dalam pembangunan perumahan dan permukiman harus dapat memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha termasuk usaha konstruksi dan mendorong berkembangnya industri serta produksi bahan bangunan murah yang memenuhi syarat teknis dan kesehatan yang terbuat dari bahan-bahan setempat.
- 5) Upaya penciptaan lingkungan permukiman yang bersih dan sehat serta ketertiban dalam penguasaan dan status pemilikannya perlu makin di tingkatkan termasuk pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan. Penyuluhan tentang perlunya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan teknik pembangunan ataupun pemugaran terus dilanjutkan dan diperluas.

k. Olah Raga

- 1) Pengembangan olah raga dalam rangka "memasyarakatkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat" ditujukan untuk membentuk watak dan kepribadian, disiplin dan sportifitas yang tinggi dan membangkitkan rasa kebanggaan nasional dan daerah.
- 2) Pembinaan olah raga diarahkan untuk meningkatkan kualitas terutama untuk mencapai prestasi tertinggi dalam berbagai cabang olah raga melalui pembinaan secara terpadu dan

berkesinambungan mulai dari pencarian bibit yang berbakat, pendidikan dan pelatihan. Olahragawan, pelatih dan pembina yang berprestasi perlu diberi perhatian khusus serta penghargaan yang wajar agar semangat dan motifasi dalam memacu prestasi lebih baik.

- 3) Dalam upaya meningkatkan kualitas olahragawan agar dapat mencapai prestasi, diupayakan untuk dapat membangun pusat-pusat pelatihan, agar para olahragawan dapat berlatih lebih teratur di samping itu untuk menunjang prestasi perlu lebih ditingkatkan peran serta masyarakat.

3. Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - a. Pembangunan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditujukan untuk meningkatkan iman dan taqwa melalui pendidikan dan pembinaan keagamaan serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Pembangunan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditujukan kepada masing-masing umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, baik secara pribadi maupun sosial serta memasyarakatkan Pancasila.
 - c. Makin dikembangkan kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga terbina hidup rukun antara sesama umat beragama, sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan antara semua umat beragama dan semua penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan.
 - d. Diciptakan hubungan timbal balik yang lebih mantap yang harmonis antar lembaga keagamaan serta antara lembaga keagamaan dengan pemerintah.
 - e. Pembangunan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditujukan untuk menumbuh kembangkan swadaya umat beragama dalam memenuhi sarana dan prasarana peribadatan serta pendidikan agama pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
 - f. Pelayanan penunaian ibadah Haji terus ditingkatkan sehingga dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna.
 - g. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama. Pembinaan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan :

- agar tidak mengarah kepada pembentukan agama baru dan diusahakan untuk dikembalikan pada sumber agamanya.
- Untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

4. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- a. Usaha-usaha pengembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguasaan maupun penerapannya dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan diupayakan untuk meningkatkan nilai tambah. Penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan kualitas sumber daya manusia, mutu pendidikan, pelatihan peran serta swasta dan masyarakat.
- b. Usaha-usaha pengkajian dan penelitian serta penerapan alih teknologi secara tepat guna dan berhasil guna, dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas seluruh sektor perekonomian daerah, sehingga dapat memenuhi permintaan pasar dan mempunyai daya saing yang tinggi serta dapat memberikan nilai tambah yang optimal.
- c. Dalam mempercepat pengembangan serta peningkatan pendayagunaan teknologi tinggi dalam pembangunan, maka koordinasi antar lembaga penelitian/ perguruan tinggi, pembinaan etika, sistem informasi dan peran pemerintah ditingkatkan secara terpadu untuk menunjang upaya percepatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi secara selektip.
- d. Perstatistikan dikembangkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan data yang lengkap, dapat diandalkan, bermutu dan bermanfaat serta tepat waktu sebagai sumber informasi yang diperlukan bagi pembangunan. sistem perstatistikan daerah terpadu yang mencakup penyimpanan data, pengembangan kelembagaan, peningkatan keahlian dan ketrampilan serta pemanfaatan sarana dan prasarana dilaksanakan secara optimal.

5. Bidang Hukum

- a. Pembangunan hukum perlu ditingkatkan dengan menyusun produk secara dinamis, selaras dengan

hukum nasional yang dapat mendukung tugas umum pemerintah daerah, pembangunan daerah maupun pembangunan nasional secara menyeluruh menurut perkembangan masyarakat dan dinamika pembangunan melalui peningkatan perencanaan hukum secara terpadu yang meliputi semua bidang pembangunan sehingga dapat memenuhi kebutuhan, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, dalam segala aspeknya.

- b. Kesadaran hukum perlu ditingkatkan dengan pemasyarakatan hukum melalui penyuluhan dan pendidikan untuk menegakkan hak dan kewajibannya.
- c. Pembangunan Aparatur Hukum perlu ditingkatkan dengan memantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing melalui peningkatan kemampuan dan kewibawaan sebagai penegak hukum dan sebagai pengayom masyarakat yang jujur, bersih, berdisiplin, tegas dan adil.

Upaya meningkatkan kualitas aparatur hukum menuju aparatur yang profesional perlu ditunjang oleh sistem pendidikan dan pelatihan, termasuk kurikulum dan manajemen pendidikan tinggi hukum.

- d. Pembangunan sarana dan prasarana hukum diarahkan untuk dapat terwujudnya kelancaran hukum sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta berfungsi sebagai pengayom masyarakat melalui peningkatan baik kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana hukum. Agar masyarakat memperoleh keadilan dan perlindungan hukum secara lancar dan cepat perlu meningkatkan fungsi dan peranan organisasi hukum, lembaga hukum dan profesi hukum melalui peningkatan pelayanan dan bantuan hukum. Sistem Jaringan dokumentasi dan informasi hukum perlu dikembangkan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Penerapan hukum dan penegakan hukum dilaksanakan secara tegas dan manusiawi berdasarkan keadilan dan pemerataan.

6. Bidang Politik Aparatur Negara, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa.

a. Politik

- 1) Pembangunan politik ditujukan pada pengembangan etika dan moral budaya politik dalam mewujudkan kehidupan politik yang mantap, dengan makin berperan dan berfungsinya

supra struktur dan infra struktur politik secara efektif, otonomi daerah secara nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta kesadaran dan peran serta politik masyarakat yang terus meningkat.

- 2) Pemasyarakatan dan pembudayaan pedoman dan Pengamalan Pancasila (P4) terus ditingkatkan dan diperluas melalui pendidikan, penataran dan keteladanan serta upaya lainnya di seluruh lapisan masyarakat.
- 3) Pendidikan politik terus ditingkatkan agar masyarakat makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga dapat berperan aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Aparatur Pemerintah

- 1) Pengabdian dan kesetiaan aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan, pemerintahan dan pembangunan perlu ditingkatkan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- 2) Pembangunan aparatur pemerintah ditujukan untuk terwujudnya dokumen administrasi negara dan pembangunan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas, fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan sistem administrasi negara yang makin andal, profesional, efisien efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan terhadap dinamika perubahan lingkungan.
- 3) Pembangunan aparatur pemerintah ditujukan pada peningkatan kualitas, efisien dan efektifitas seluruh tatanan administrasi pemerintahan termasuk peningkatan kemampuan dan disiplin pengabdian keteladanan dan kesejahteraan aparaturnya, sehingga makin mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya terutama dalam melayani, mengayomi serta menumbuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan serta tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat.
- 4) Sistem pengawasan keuangan daerah dan pembangunan baik pengawasan melekat fungsional termasuk pengawasan oleh masyarakat dimantapkan secara terpadu dan konsisten agar

tercapai efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penertiban aparatur pemerintah terutama dalam menegakkan disiplin serta menanggulangi penyalahgunaan wewenang dan bentuk penyelewengan lainnya.

- 5) Pembinaan kepegawaian ditujukan terwujudnya kepegawaian yang mantap dengan pengembangan karier berdasarkan prestasi kerja, kemampuan profesional, keahlian dan ketrampilan serta kemantapan sikap mental aparat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 terus ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan, penugasan, bimbingan dan konsultasi serta melalui pengawasan motivasi, kode etik dan disiplin kedinasan yang didukung sistem informasi kepegawaian yang mantap serta dilengkapi sistem pemberian penghargaan yang wajar.
- 6) Hubungan kerja yang serasi dan antara aparatur pemerintah pusat dan daerah dalam upaya makin mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab terus dikembangkan secara realistis atas dasar azas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembangunan.
- 7) Koordinasi, kerjasama dan kemampuan aparatur pemerintah, makin dimantapkan untuk lebih meningkatkan keserasian, kelancaran efisiensi dan efektifitas serta keterpaduan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.

c. Penerangan, Komunikasi dan Media Massa

- 1) Pembangunan penerangan, komunikasi dan media massa ditujukan untuk dapat menciptakan iklim yang dapat mendorong terjadinya interaksi secara timbal balik dan bertanggung jawab antara pers, masyarakat dan pemerintah dalam semua aspek program pembangunan untuk menuju kemandirian dan memasyarakatkan pengamalan Pancasila. Untuk itu maka penerangan dan media massa dalam mengkonsumsi/menginformasikan pembangunan harus didukung dengan kualitas sumberdaya manusia yang memadai dan sarana prasarana penerangan yang canggih, sesuai dengan pertimbangan teknologi, sehingga informasi makin dapat menjangkau seluruh pelosok wilayah.
- 2) Dalam meningkatkan peranan pers perlu terus

diupayakan makin berkembangnya interaksi positif antara pers, masyarakat dan pemerintah, terutama dalam mendukung penyebaran informasi yang obyektif, andal, edukatif, kontrol sosial yang konstruktif, aspirasi rakyat dan memperluas komunikasi dan peran serta masyarakat.

- 3) Dalam pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya, kualitas informasi dan peran media massa, baik cetak maupun elektronik seperti radio, televisi, video, film, surat kabar, majalah dan kantor berita perlu makin ditingkatkan, baik jumlah maupun kualitas sehingga mempunyai jangkauan wilayah yang lebih luas terutama koran dan perpustakaan masuk desa.

7. Bidang Pertahanan Keamanan

- a. Pembinaan dan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama ditujukan untuk mewujudkan terpeliharanya keadaan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat bebas dari segala hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan melalui penyuluhan, penerangan, pelatihan serta pendidikan Bela Negara kepada masyarakat disemua jenjang pendidikan terus dilakukan.
- b. Kemampuan masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan pelaksanaan sistem Keamanan swakarsa ditingkatkan agar mampu memantau dan menangkal secara dini dan tepat terhadap gangguan keamanan.
- c. Pembinaan pertahanan sipil dengan mengikutsertakan seluruh anggota masyarakat dalam membela negara melalui wadah Pertahanan Sipil baik sebagai Perlawanan Rakyat (WANRA), Keamanan Rakyat (KAMRA) maupun Perlindungan Masyarakat (BINMAS) agar mampu memberi jaminan keberhasilan pembangunan.
- d. Dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintikan POLRI, maka pembinaan masyarakat perlu terus dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran secara swakarsa mampu mengantisipasi dan menanggulangi segala ancaman dan gangguan.
- e. Pembinaan Pertahanan Sipil akan ditingkatkan dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat sehingga mampu menanggulangi gangguan keamanan dan melindungi masyarakat.
- f. ABRI melaksanakan fungsi sebagai kekuatan

pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Dalam melaksanakan fungsi politik, ABRI harus mampu berperan sebagai stabilisator, dinamisator dan unsur pemersatu kehidupan di daerah, berperan serta secara aktif dalam pembangunan serta memperkuat kehidupan konstitusional, demokrasi dan tegaknya hukum dalam rangka memperkuat ketahanan nasional. Peran ABRI sebagai komponen utama kekuatan pertahanan keamanan negara dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta perlu lebih dikembangkan dengan menerapkan pembinaan teritorial yang diselenggarakan secara terpadu dengan instansi pemerintah dan masyarakat.

- g. Bhakti ABRI akan terus ditingkatkan untuk mendorong pembangunan diseluruh bidang terutama di daerah kurang layak huni sebagai salah satu wujud kemanusiaan ABRI - rakyat dalam rangka memacu pemerataan pembangunan daerah dan hasil-hasilnya.

F. Kebijakan Penataan Ruang Daerah

- 1) Dalam penataan ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta pengembangannya difungsikan sebagai pusat pelayanan kota dan perkotaan.

Selain itu diperlukan langkah-langkah formulasi dari beberapa yang bersifat pelayanan informal menuju ke pelayanan formal.

- 2) Penempatan berbagai kegiatan pada ruang di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dipertimbangkan berdasarkan konsep P. Mangkubumi tahun 1755, skala kegiatan, kawasan yang ditetapkan, serta aspek lingkungan menuju terwujudnya struktur tata ruang yang mantap.
- 3) Peningkatan kualitas ruang menuju Yogyakarta Berhati Nyaman dicapai dengan memantapkan predikat dan fungsi kota.

Untuk mewujudkan :

- Predikat kota dengan mengusahakan proses pelestarian dalam arti bentuk, ciri, citra dan sifatnya.
- Fungsi kota dengan mengusahakan peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kota dan perkotaan.

Dengan demikian pola pemanfaatan ruang kota terdiri atas kawasan budaya dalam statusnya Fix dan semi Fix terhadap pelestarian, namun tetap dipacu secara terkendali berdampak positif dan tak lepas dari karakteristiknya. Serta status Non Fix yang lebih

dapat dikembangkan untuk mengatasi pertumbuhan.

- 4) Pemerataan penumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dicapai dengan cara mendorong pemerataan pertumbuhan pelayanan skala perkotaan yang didukung sistem dan kualitas prasarana transportasi.
- 5) Dalam peningkatan kualitas ruang kawasan-kawasan tetap ditekankan dengan keberadaan perkampungan sebagai tempat tinggal, tempat kerja dan sumber produksi. Selain itu juga dalam rangka memformalkan status hak penguasaan dan penggunaan tanahnya.
- 6) Pengembangan dan peningkatan kualitas pertumbuhan di daerah perbatasan ditangani secara satu manajemen yang dilaksanakan melalui kerjasama antar Daerah Tingkat II.
- 7) Pengembangan dan peningkatan prasaranadan sarana kota secara terpadu melalui program P3KT.

G. Strategi Pembiayaan Pembangunan

Pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Tersedianya dana yang memadai dengan kebijaksanaan yang tepat merupakan syarat utama bagi kelangsungan dan peningkatan pembangunan disemua bidang dan sektor dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan. Untuk itu maka langkah-langkah strategi yang akan ditempuh adalah :

1. Kebijakan pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah diarahkan untuk dapat mendorong dan memancing serta mengembangkan partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan.
2. Potensi yang berasal dari masyarakat baik melalui investasi modal dalam negeri, investasi modal asing maupun penyertaan dana masyarakat yang dimobilisasikan perlu lebih ditingkatkan dan dimanfaatkan seefektif mungkin untuk menunjang pelaksanaan pembangunan.
3. Sumber dana pembangunan yang berasal dari Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah Tingkat I pengalokasiannya perlu lebih terkoordinasi dan terintegrasi secara menyeluruh guna mewujudkan keselarasan pembangunan daerah.
4. Upaya peningkatan kemampuan penyediaan anggaran daerah khususnya dari pendapatan asli daerah akan lebih dimantapkan lewat Intensifikasi, ekstensifikasi penanganan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Sejalan dengan maksud tersebut upaya meningkatkan kemampuan aparatur dibidang keuangan akan lebih digalakkan yang

didukung dengan sarana prasarana yang lebih memadai khususnya dalam sistem pengelolaan dan kualitas pelayanan pada masyarakat. Di samping itu diupayakan pula menciptakan suasana yang dapat menumbuhkan kesadaran dan kebanggaan bagi masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.

5. Untuk menunjang pembangunan daerah yang menyangkut suatu proyek yang sangat diperlukan dalam arti produktif dan bermanfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah akan berusaha memanfaatkan dana pinjaman, baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan serta masih dalam batas-batas kemampuan untuk membayar kembali.
6. Mengingat dana pembangunan Daerah terbatas maka pengeluaran/Belanja Daerah harus benar-benar diarahkan sesuai dengan sasaran menurut skala prioritas pembangunan Daerah yang telah ditetapkan setiap tahun.
7. Kebijakan sistem anggaran berimbang dan dinamis yang telah menunjukkan hasil positif pada Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah dan akan tetap dilaksanakan sepanjang hal tersebut sesuai dengan kebijakan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun kebijakan Nasional/Pemerintah Pusat.
8. Kegiatan pengendalian dan pengawasan dibidang keuangan akan lebih ditingkatkan terutama pengawasan melekat dalam mencegah pemborosan dan segala bentuk penyimpangan baik dari segi penerimaan maupun pembelanjaan.

BAB V

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Pola Dasar Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah yang ditetapkan setiap lima tahun sekali berdasarkan perkembangan dan tingkat kehidupan rakyat dan pelaksanaannya dituangkan dalam pokok-pokok kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah yang ditentukan oleh Walikota-madya Kepala Daerah dengan mendengarkan dan memperhatikan secara sungguh-sungguh pendapat semua golongan terutama Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah.

Walikotamadya Kepala Daerah memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas tugas menjalankan Pembangunan Daerah.

Pembangunan Daerah diselenggarakan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah dan wakil-wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam hubungan ini pemerintah berkewajiban Untuk memberi pengarahan dan bimbingan, serta menciptakan iklim yang mendorong peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan.

B. Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah

Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah disusun berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah yang meliputi kurun waktu 1994/1995 - 1998/1999 pelaksanaan pembangunan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan. Ketiga unsur Pembngunan tersebut saling mengkait dan perlu dikembangkan secara selaras, terpadu dan saling memperkuat.

Program pelaksanaan kebijaksanaan serta usaha operasional pembangunan untuk setiap tahun dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

Program dan proyek yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta untuk setiap tahun dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Program dan proyek yang menjadi tugas dan tanggung jawab Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Pusat. Walikolamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta berkewajiban untuk memperjuangkannya berdasarkan prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah, peranan lembaga yang melaksanakan fungsi pemeriksaan pengawasan dan pengendalian perlu semakin dikemhangkan.

C. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta diperbaiki atau disusun kembali dan disesuaikan dengan perkembangan pembangunan setiap lima tahun.

BAB VI

PENUTUP

Keberhasilan pembangunan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sejak Pembangunan Lima Tahun Pertama Daerah sampai

dengan Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah menjadi landasan Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah untuk menuju kemandirian otonomi daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan usaha-usaha pembangunan sebagai pengamalan Pancasila sangat tergantung pada peran serta masyarakat, sikap mental yang ulet, disiplin, pengabdian dari segenap aparat pemerintah di semua lapisan serta kemampuan dan keberhasilan untuk menciptakan stabilitas daerah yang mantap dan terkendali. Untuk menjamin terlaksananya pembangunan daerah, maka pembangunan harus didukung oleh mekanisme dan koordinasi secara terpadu. Hasil pembangunan harus dapat dinikmati secara merata dan adil oleh seluruh masyarakat dalam usaha meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan baik lahiriah maupun batiniah.

Kesejahteraan yang berkeadilan sosial, sekaligus akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan untuk memperkokoh ketahanan nasional dan selanjutnya akan meratakan jalan bagi generasi penerus bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada seluruh rakyat serta pernerintah dalam melaksanakan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Yogyakarta, 28 Pebruari 1994

Dewan Perwakilan Rakyat
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta
Ketua

ttd.

WAHJU HARDJONO

Daerah Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II
Yogyakarta

ttd.

R. WIDAGDO